



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED



SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Yessi Yunius, S.E., M.Si.

NIP. 19680321 199703 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vii
Ringkasan	viii
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025	40
Tabel 15. Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	41
Tabel 16. Rincian Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2024	42
Tabel 16. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel 17. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025	43
Tabel 18. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025	43
Tabel 19. Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2025	43
Tabel 21. Mutasi Kurang Persediaan per 31 Desember 2025	44
Tabel 22. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	45
Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	49
Tabel 27. Uraian Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025	52
Tabel 28. Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	55
Tabel 29. Mutasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya	56
Tabel 30. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025	56
Tabel 34. Utang Yang Belum Ditagihkan Per 31 Desember 2025	57
Tabel 37. Perbandingan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	58
Tabel 38. Perubahan Ekuitas Tahun 2025	58
Tabel 39. Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel 40. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	59
Tabel 41. Mutasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	60
Tabel 46. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel 46. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Per 31 Desember 2025	61
Tabel 48. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel 49. Mutasi Beban Persediaan	61
Tabel 50. Mutasi Tambah Persediaan	62
Tabel 51. Daftar Persediaan	62
Tabel 52. Beban Barang Konsumsi per 31 Desember 2025	62
Tabel 53. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel 54. Mutasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	63
Tabel 55. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel 56. Mutasi Beban Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	64
Tabel 57. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	65
Tabel 58. Mutasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	65
Tabel 59. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025	66
Tabel 60. Mutasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025	66
Tabel 62. Perbandingan Surplus Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel 63. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel 64. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	70
Tabel 65. Ditagihkan ke Entitas Lain	70
Tabel 66. Diterima dari Entitas Lain	71
Tabel 67. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas	71
Tabel 68. Perbandingan Ekuitas Akhir	72

Tabel 69. Semula Data Pejabat Struktural dan Fungsional	73
Tabel 70. Menjadi Data Pejabat Struktural dan Fungsional 31 Desember 2025	74
Tabel 71. Semula Data Pengelola Keuangan	75
Tabel 72. Menjadi Data Pengelola Keuangan	75
Tabel 73. Daftar Pengelola Keuangan Pembantu KPA	75
Tabel 75. Menjadi Daftar Pengelola Keuangan Pembantu PPK.....	76
Tabel 76. Rincian Realisasi Kinerja	77
Tabel 77. Semula User Pejabat Operator dan Administrator Aplikasi SAKTI.....	82
Tabel 78. Menjadi User Pejabat Operator dan Administrator Aplikasi SAKTI	83
Tabel 79. Data Rekening Virtual Account	83
Tabel 80. Rekap Rekening PDHL	84
Tabel 81. Rekap Rekening PDH Pilgub	85
Tabel 82. Rekap Rekening PDH Pilbup	87
Tabel 3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL.....	90
Tabel 4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi Belanja.....	25
----------------------------------	----



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang

Telp. (024) 76423074

Website : jateng.bawaslu.go.id

E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang. 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Yessi Yuniuss, S.E., M.Si.
NIP. 19680321 199703 2 003

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp307.974.692.

Realisasi Belanja pada TA 2025 sebesar Rp145.322.627.189. atau mencapai 92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp157.944.026.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.084.202.258 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp535.499.074; Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.542.208.432 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.494.752. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp72.964.504 dan Rp17.011.237.754.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban. surplus/defisit dari operasional. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.005.038. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp149.737.440.205, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp149.734.435.167. Terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp71.484.623. Pos Luar Biasa adalah Nihil atau sebesar Rp0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp149.662.950.544.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp147.977.746.320 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp149.662.950.544, dikurangi Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar minus Rp83.434.704.973, ditambah Transaksi Antar Entitas yaitu sebesar Rp102.131.146.951. Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp130.966.508.566 sehingga Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp17.011.237.754.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025		Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	%	2024		Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Anggaran	Realisasi (Rp)		
PENDAPATAN	B.1								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	307.974.692	307.974.692	0	0	764.472.855	764.472.855	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	307.974.692	307.974.692	0	0	764.472.855	764.472.855	0
BELANJA	B.2								
Belanja Pegawai	B.2.1	85.020.324.000,	75.488.819.990,	(9.531.504.010,)	88	53.863.544.000,	48.228.177.570,	(5.635.366.430,)	89
Belanja Barang	B.2.2	72.923.702.000,	69.833.807.199,	(3.089.894.801,)	95	976.912.699.000,	856.896.331.717,	(120.016.367.283,)	87
Belanja modal	B.2.3	0	0	0	0	12.727.749.000,	11.294.842.537,	(1.432.906.463,)	88
JUMLAH BELANJA		157.944.026.000	145.322.627.189	(12.621.398.811)	92	1.043.503.992.000	916.419.351.824,	(127.084.640.176)	88

Semarang, 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Yessi Yunius, S.E., M.Si.
NIP. 19680321 199703 2 003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	125.030.884.314
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	413.925.110	644.855.110
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	0	49.214.891
Persediaan	C.5	121.573.964,	15.911.000
JUMLAH ASET LANCAR		535.499.074	125.740.865.315
ASET TETAP			
Tanah	C.6	5.132.877.000,	5.132.877.000
Peralatan dan Mesin	C.7	37.654.468.832,	43.892.607.897
Gedung dan Bangunan	C.8	1.716.502.224,	1.716.502.224
Aset Tetap Lainnya	C.9	1.225.353.888,	1.606.598.388
AKUMULASI PENYUSUTAN		(29.186.993.512,)	(29.924.646.304)
JUMLAH ASET TETAP		16.542.208.432,	22.423.939.205
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	3.659.670,	993.406.561
Aset Lain-lain	C.11	893.871.891,	446.534.905
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(891.036.809,)	(1.410.479.747)
JUMLAH ASET LAINNYA		6.494.752,	29.461.719
JUMLAH ASET		17.084.202.258,	148.194.266.239
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	72.964.504	216.519.919
Utang yang Belum Ditagihkan	C.13	0	0
Hibah yang Belum Disahkan	C.14	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.15	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		72.964.504	216.519.919
JUMLAH KEWAJIBAN		72.964.504	216.519.919
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	17.011.237.754	147.977.746.320
JUMLAH EKUITAS		17.011.237.754	147.977.746.320
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.084.202.258	148.194.266.239

Semarang. 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran.


Yessi Yunius, S.E., M.Si.

NIP. 19680321 199703 2 003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	3.005.038,	63.490.299,
Jumlah Pendapatan		3.005.038,	63.490.299,
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	75.514.673.795,	48.228.177.570,
Beban Persediaan	D.3	17.586.000,	29.793.000,
Beban Barang dan Jasa	D.4	36.348.966.988,	615.852.587.281,
Beban Pemeliharaan	D.5	1.886.549.684,	3.534.086.919,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	31.536.562.343,	237.936.292.956,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.433.101.395,	4.052.461.666,
JUMLAH BEBAN		149.737.440.205,	909.633.399.392,
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(149.734.435.167,)	(909.569.909.093,)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.9	(184.270.140,)	(86.664.774,)
Pendapatan Pelepasan Aset		0,	62.715.226,
Beban Pelepasan Aset		184.270.140,	149.380.000,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	255.754.763,	2.243.349.944,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		255.754.763,	2.243.349.944,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		71.484.623,	2.156.685.170,
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(149.662.950.544,)	(907.413.223.923,)
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.11	(149.662.950.544,)	(907.413.223.923,)

Semarang. 5 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran.



Yessi Yunius, S.E., M.Si.

NIP. 19680321 199703 2 003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
Ekuitas Awal	E.1	147.977.746.320,	221.173.717.477,
Surplus/Defisit-Lo	E.2	(149.662.950.544,)	(907.413.223.923,)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		0	0
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(83.434.704.973,)	(100.333.517,)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Selisih Revaluasi Aset		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	18.868.165,	(100.333.517,)
Lain-Lain	E.3.2	(83.453.573.138,)	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	102.131.146.951,	834.317.586.283,
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	(130.966.508.566,)	(73.195.971.157,)
Ekuitas Akhir	E.6	17.011.237.754,	147.977.746.320,

Semarang. 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Yessi Yunius, S.E., M.Si.
NIP. 19680321 199703 2 003

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah

*Dasar
Hukum
dan Profil
Bawaslu
Jawa
Tengah*

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 022/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi;

- l. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2023 tentang pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - m. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/Pl.09/K1/12/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - n. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - o. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-17/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2024;
 - p. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1789/KU.02/SJ/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024;
 - q. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Bawaslu Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686328/2024 Revisi ke-6 tanggal 9 September 2024.
1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

 - a. Bawaslu Provinsi bertugas :
 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. yang terdiri atas:
 - a) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

- b) pemutakhiran data pemilih. penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) pergerakan surat suara. berita acara penghitungan suara. dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - j) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
 - l) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi. yang terdiri atas:
- a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola. memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengkoordinasikan. menyupervisi. membimbing. memantau. dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa. mengkaji. dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
 - (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

b. Bawaslu Provinsi berwenang:

- 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung

jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B. Bawaslu Jawa Tengah diklasifikasikan dalam Kelas A. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu
- c. Bagian Hukum. Hubungan antar Lembaga. dan Data dan Informasi; dan
- d. Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No. 1. Gajahmungkur. Kec. Semarang Selatan. Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan

dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berkomitmen dengan visi ***“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”***. Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem SAKTI. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sehubungan dengan implementasi SAKTI, maka per 1 Januari 2023 aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA sudah tidak digunakan lagi karena SAI sudah terintegrasi dalam SAKTI tersebut.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai pendekatan dalam menyusun laporan keuangan khususnya terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

(1) A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. terjadinya konsumsi aset. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang jangka panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar.

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- a. harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya.

dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
angka
Panjang*

d. *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau per-buatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 4 (Empat) kali dari DIPA awal dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi ke – 01 tanggal 21 Februari 2025

Revisi Tingkat DJA sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Total Pagu DIPA awal sebesar Rp 114.664.838.000,- menjadi Rp 68.167.773.000. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendukung kebijakan tersebut dengan menyampaikan usulan revisi berupa pemotongan/penghapusan pagu sesuai dengan besaran efisiensi pada lampiran Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 46.497.065.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.1 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Pertama

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
1	Belanja Non Operasional dihapus	Rp 8.116.283.000	Rp -	Rp 8.116.283.000	100%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, P3K, Uang Kehormatan	Rp 53.805.289.000	Rp 53.805.289.000	Rp -	0%
3	Inkin yang sudah diblokir	Rp 8.200.375.000	Rp -	Rp 8.200.375.000	100%
4	Honorarium dan Inkin PPNPN, Honor Tenaga Pendukung Provinsi 3 Bulan	Rp 1.033.600.000	Rp 256.110.000	Rp 777.490.000	75%
5	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Provinsi dihapus	Rp 82.620.000	Rp -	Rp 82.620.000	100%
6	Jamuan Tamu Provinsi dihapus	Rp 123.840.000	Rp -	Rp 123.840.000	100%
7	Langganan Internet Provinsi 2 bulan	Rp 240.000.000	Rp 16.000.000	Rp 224.000.000	93%
8	Lembur Provinsi dihapus	Rp 101.800.000	Rp -	Rp 101.800.000	100%
9	BPJS Ketenagakerjaan Prov dan KabKota 3 Bulan	Rp 133.440.000	Rp 20.850.000	Rp 112.590.000	84%
10	Langganan Aplikasi Video Conference Provinsi dihapus	Rp 87.000.000	Rp -	Rp 87.000.000	100%
11	Jasa Pengiriman Surat Provinsi dihapus	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	100%
12	Honorarium Pengelola Keuangan Provinsi dihapus	Rp 155.208.000	Rp -	Rp 155.208.000	100%

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
13	Belanja Pakaian Dinas Provinsi dihapus	Rp 112.164.000	Rp -	Rp 112.164.000	100%
14	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Provinsi dihapus	Rp 26.010.000	Rp -	Rp 26.010.000	100%
15	Langganan Listrik Provinsi 3 Bulan	Rp 300.000.000	Rp 75.000.000	Rp 225.000.000	75%
16	Langganan Telepon Provinsi 3 Bulan	Rp 11.932.000	Rp 1.800.000	Rp 10.132.000	85%
17	Langganan Air dihapus	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 6.000.000	100%
18	Sewa Rumah Dinas dihapus	Rp 366.900.000	Rp -	Rp 366.900.000	100%
19	Jasa Outsourcing Tenaga Pendukung Provinsi 3 Bulan	Rp 78.000.000	Rp 19.500.000	Rp 58.500.000	75%
20	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Provinsi dihapus	Rp 110.393.000	Rp -	Rp 110.393.000	100%
21	Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Pejabat Provinsi dihapus	Rp 550.840.000	Rp -	Rp 550.840.000	100%
22	Pemeliharaan Inventaris Kantor Provinsi dihapus	Rp 49.930.000	Rp -	Rp 49.930.000	100%
23	Honorarium dan Inkin PPNN 3 Bulan, Honor Tenaga Pendukung 2 bulan Kabkota	Rp 7.538.700.000	Rp 1.778.350.000	Rp 5.760.350.000	76%
24	Honorarium Korsek dan Staf PNS (Kab/Kota) 1 Bulan	Rp 2.201.472.000	Rp 154.336.000	Rp 2.047.136.000	93%
25	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Kabkota dihapus	Rp 1.050.000.000	Rp -	Rp 1.050.000.000	100%
26	Jamuan Tamu Kabkota dihapus	Rp 1.449.000.000	Rp -	Rp 1.449.000.000	100%
27	Langganan Internet Kabkota 2 Bulan	Rp 840.000.000	Rp 61.288.000	Rp 778.712.000	93%
28	Lembur Kabkota dihapus	Rp 92.570.000	Rp -	Rp 92.570.000	100%
29	Langganan Aplikasi Video Conference dihapus	Rp 210.000.000	Rp -	Rp 210.000.000	100%
30	Jasa Pengiriman Surat Kabkota dihapus	Rp 126.000.000	Rp -	Rp 126.000.000	100%
31	Honorarium Pengelola	Rp 1.363.272.000	Rp -	Rp 1.363.272.000	100%

NO	DETAIL	SEMULA	MENJADI	EFISIENSI	EFISIENSI %
	Kuangan kabkota dihapus				
32	Pakaian Dinas Seragam Kabkota dihapus	Rp 786.160.000	Rp -	Rp 786.160.000	100%
33	Listrik Kabkota 1 bulan	Rp 1.296.000.000	Rp 108.000.000	Rp 1.188.000.000	92%
34	Telepon Kabkota 1 bulan	Rp 167.640.000	Rp 13.970.000	Rp 153.670.000	92%
35	Air kabkota 1 bulan	Rp 258.240.000	Rp 21.520.000	Rp 236.720.000	92%
36	Sewa Kendaraan Operasional Kabkota sesuai realisasi	Rp 14.905.400.000	Rp 11.703.360.000	Rp 3.202.040.000	21%
37	Jasa Outsourcing Tenaga Pendukung Kabkota 2 bulan	Rp 794.400.000	Rp 132.400.000	Rp 662.000.000	83%
38	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kabkota dihapus	Rp 948.000.000	Rp -	Rp 948.000.000	100%
39	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pinjam Pakai Pemda Kabkota dihapus	Rp 1.446.110.000	Rp -	Rp 1.446.110.000	100%
40	Pemeliharaan Inventaris Kantor Kabkota dihapus	Rp 573.650.000	Rp -	Rp 573.650.000	100%
41	Pemeliharaan Sewa Kendaraan Operasional Kabkota dihapus	Rp 4.908.600.000	Rp -	Rp 4.908.600.000	100%
Total		Rp 114.664.838.000	Rp 68.167.773.000	Rp 46.497.065.000	41%

2. Revisi ke- 02 tanggal 12 April 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal penambahan pagu sumber dana hibah berupa belanja barang untuk lanjutan pelaksanaan hibah tahun 2024, penyesuaian rencana penarikan dana berdasarkan rencana pencairan belanja satker, pemutakhiran data hasil revisi POK, dan mempercepat pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari hibah. Total pagu revisi sebelumnya Rp 68.167.773.000,- menjadi Rp 129.986.037.000,- dengan penambahan pagu hibah sebesar Rp 61.818.264.000,- sebagaimana daftar terlampir:

Tabel.2 Penjelasan Rincian Revisi Anggaran Kedua

No	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Penambahan Pagu
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp 13.230.353.000
2	2Z6Z6XMA	Kabupaten Banjarnegara	Rp 1.625.057.000
3	2FH167JA	Kabupaten Banyumas	Rp 4.596.469.000
4	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp 1.055.705.000
5	24RMB9VA	Kabupaten Blora	Rp 826.324.000
6	2DKRC59A	Kabupaten Boyolali	Rp 1.106.029.000
7	2PFCE2BA	Kabupaten Brebes	Rp 1.500.417.000

No	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Penambahan Pagu
8	25T811QA	Kabupaten Cilacap	Rp 1.162.792.000
9	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp 1.504.488.000
10	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp 917.570.000
11	21MDPVGA	Kabupaten Jepara	Rp 880.737.000
12	2A6DA38A	Kabupaten Karanganyar	Rp 850.172.000
13	26L2JR3A	Kabupaten Kebumen	Rp 1.149.423.000
14	2WUF6HDA	Kabupaten Kendal	Rp 1.371.268.000
15	2QGD31A	Kabupaten Klaten	Rp 1.855.379.000
16	29UBJNHA	Kabupaten Kudus	Rp 1.190.622.000
17	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp 1.953.272.000
18	2QCR286A	Kabupaten Pati	Rp 1.631.829.000
19	2W4XSWXA	Kabupaten Pekalongan	Rp 1.431.247.000
20	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp 1.885.285.000
21	2US6TL8A	Kabupaten Purbalingga	Rp 1.174.716.000
22	2BK3B5GA	Kabupaten Purworejo	Rp 1.197.626.000
23	29TCV3MA	Kabupaten Rembang	Rp 1.285.000.000
24	2K3EDGFA	Kabupaten Semarang	Rp 1.565.350.000
25	2QJ7J8MA	Kabupaten Sragen	Rp 1.264.485.000
26	225FYZ9A	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1.089.743.000
27	28ZCNTDA	Kabupaten Tegal	Rp 2.086.338.000
28	2ZX7SC8A	Kabupaten Temanggung	Rp 1.252.102.000
29	2LRG92BA	Kabupaten Wonogiri	Rp 892.499.000
30	287M76JA	Kabupaten Wonosobo	Rp 1.517.006.000
31	2UG5MTUA	Kota Magelang	Rp 607.602.000
32	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp 346.244.000
33	2K8AGFNA	Kota Salatiga	Rp 749.075.000
34	2LHYJJXA	Kota Semarang	Rp 2.409.044.000
35	2R1TTTGA	Kota Surakarta	Rp 918.524.000
36	229KGWQA	Kota Tegal	Rp 1.738.472.000
TOTAL			Rp 61.818.264.000

3. Revisi ke -03 tanggal 19 Mei 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja barang yang bersumber dari dana hibah. Total pagu tetap.sebesar Rp 129.986.037.000,-.

4. Revisi Ke-4 tanggal 10 Juli 2025

Revisi Tingkat DJA perihal Pemenuhan Belanja Operasional dan Non Operasional dan Penyesuaian terhadap Pagu Blokir. Pemenuhan Belanja Operasional terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK sebesar Rp 12.279.950.000,-, Honorarium PPNPN, Belanja Langganan Listrik, Air, Internet, Telepon, dan Langganan Zoom sebesar Rp 6.274.277.000,-. Penambahan pagu Belanja Non Operasional terdiri dari Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan total sebesar Rp 8.693.374.000,-. Total pagu penambahan sebesar Rp 27.247.601.000,-. Total pagu revisi sebelumnya sebesar Rp 129.986.037.000,- menjadi sebesar Rp 157.233.638.000,-.

5. Revisi Ke-5 tanggal 03 Oktober 2025

Revisi Tingkat DJA perihal Penambahan Kegiatan untuk Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sewa Kendaraan Operasional Roda 4, Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 selama 3 bulan, dan Pecah Dipa untuk 5 Satker Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Bawaslu Kota Semarang
- b) Bawaslu Kabupaten Semarang
- c) Bawaslu Kabupaten Demak
- d) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
- e) Bawaslu Kabupaten Sragen

Total penambahan pagu sebesar Rp 1.843.261.000,- menjadi Rp 159.076.899.000,-.

6. Revisi Ke-6 tanggal 14 Oktober 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK dan perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA. Total pagu tetap sebesar Rp 159.076.899.000,-.

7. Revisi Ke-7 tanggal 24 Oktober 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Pengurangan Pagu Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana berikut:

NO	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Pengurangan Pagu
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp 6.383.553.000
2	2Z6Z6XMA	Kabupaten Banjarnegara	Rp 728.351.000
3	2FH167JA	Kabupaten Banyumas	Rp 2.855.831.000
4	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp 8.253.000
5	24RMB9VA	Kabupaten Blora	Rp 155.815.000
6	2DKRC59A	Kabupaten Boyolali	Rp 52.540.000
7	2PFCE2BA	Kabupaten Brebes	Rp 571.571.000
8	25T811QA	Kabupaten Cilacap	Rp 154.107.000
9	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp 438.255.000
10	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp 4.625.000
11	21MDPVGA	Kabupaten Jepara	Rp 43.531.000
12	2A6DA38A	Kabupaten Karanganyar	Rp 9.971.000
13	26L2JR3A	Kabupaten Kebumen	Rp 137.442.000
14	2WUF6HDA	Kabupaten Kendal	Rp 94.430.000
15	2QGDX31A	Kabupaten Klaten	Rp 362.210.000
16	29UBJNHA	Kabupaten Kudus	Rp 181.094.000
17	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp 171.217.000
18	2QCR286A	Kabupaten Pati	Rp 470.206.000
19	2W4XSWXA	Kabupaten Pekalongan	Rp 535.270.000
20	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp 797.735.000

NO	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Pengurangan Pagu
21	2US6TL8A	Kabupaten Purbalingga	Rp 151.690.000
22	2BK3B5GA	Kabupaten Purworejo	Rp 81.488.000
23	29TCV3MA	Kabupaten Rembang	Rp 98.820.000
24	2K3EDGFA	Kabupaten Semarang	Rp 785.101.000
25	2QJ7J8MA	Kabupaten Sragen	Rp 262.510.000
26	225FYZ9A	Kabupaten Sukoharjo	Rp 202.008.000
27	28ZCNTDA	Kabupaten Tegal	Rp 536.084.000
28	2ZX7SC8A	Kabupaten Temanggung	Rp 179.930.000
29	2LRG92BA	Kabupaten Wonogiri	Rp 63.891.000
30	287M76JA	Kabupaten Wonosobo	Rp 567.680.000
31	2UG5MTUA	Kota Magelang	Rp 17.489.000
32	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp 3.857.000
33	2K8AGFNA	Kota Salatiga	Rp 301.452.000
34	2LHYJJXA	Kota Semarang	Rp 882.522.000
35	2R1TTTGA	Kota Surakarta	Rp 268.123.000
36	229KGWQA	Kota Tegal	Rp 743.534.000
TOTAL			Rp 19.302.186.000

Total pagu semula sebesar Rp 159.076.899.000 berkurang sebesar Rp 19.302.186.000,- menjadi sebesar Rp 139.774.713.000,-.

8. Revisi Ke-8 tanggal 03 November 2025

Revisi Tingkat DJA perihal pemenuhan belanja operasional pegawai sebesar Rp 18.860.085.000,- yang terdiri dari:

- 1) Gaji dan Tunjangan CPNS yang dilantik pada tanggal 1 Juni 2025;
- 2) Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap 1 yang dilantik pada tanggal 1 Juli 2025; dan
- 3) Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap 2 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2025.

Total pagu semula sebesar Rp 139.774.713.000,- menjadi sebesar Rp 158.634.798.000,-.

9. Revisi Ke-9 tanggal 11 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.634.798.000,-.

10. Revisi Ke-10 tanggal 12 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.634.798.000,-.

11. Revisi Ke-11 tanggal 16 Desember 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Penambahan pagu sumber dana hibah Register 2VXRA31A dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 150.000.000,- berupa belanja barang untuk Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Total pagu semula sebesar Rp 158.634.798.000,- menjadi sebesar Rp 158.784.798.000,-.

12. Revisi Ke-12 tanggal 19 Desember 2025

Revisi Tingkat Pemutakhiran KPA perihal pemutakhiran data hasil revisi POK. Total pagu tetap sebesar Rp 158.784.798.000,-.

13. Revisi Ke-13 tanggal 24 Desember 2025

Revisi Tingkat Kanwil perihal Pengurangan pagu yang bersumber dari Hibah dan perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Terdapat pengurangan pagu hibah untuk belanja barang dalam rangka Pemilihan Tahun 2025 sebagaimana berikut:

NO	Kode Register	Bawaslu Prov/Kab/Kota	Jumlah Pengurangan Pagu
1	2RUC51XA	Provinsi Jawa Tengah	Rp 636.650.000
2	2CNYXEPA	Kabupaten Batang	Rp 11.100.000
3	2Q1RPMWA	Kabupaten Demak	Rp 110.598.000
4	22DL9UTA	Kabupaten Grobogan	Rp 17.704.000
5	2SAQR6RA	Kabupaten Magelang	Rp 45.883.000
6	2UD6LAJA	Kabupaten Pemalang	Rp 13.699.000
7	2YMGY6XA	Kota Pekalongan	Rp 5.138.000
TOTAL			Rp 840.772.000

Total pagu semula sebesar Rp 158.784.798.000 menjadi sebesar Rp 157.944.026.000,-.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 307.974.692 dengan Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	307.974.692	0
Jumlah	0	307.974.692	0

Realisasi Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp307.974.692 dan Rp764.472.855 atau mengalami penurunan sebesar 60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%Naik/Turun
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.038	11.870.299	-100%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	62.715.226	-100%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.828.502	350.000	3280%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	243.026.560	637.917.330	-62%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	50.114.592	0	100%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.000.000	51.620.000	-94%
Jumlah Pendapatan	307.974.692	764.472.855	-60%

Pendapatan jasa giro sejumlah Rp5.038 merupakan setor jasa giro dari rekening kecamatan di wilayah Bawaslu Kabupaten Kendal dengan Nomor NTPN 0AFBC0NA0DEKHVD8.

Rincian Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp11.828.502 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Dokumen	Nominal
1	Potongan SPM Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PNS Maret s.d Oktober 2024	14-Mar-25	00468A	294
2	Potongan SPM Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PNS September s.d Oktober 2024	21-Mei-25	01199A	5.280.584
3	Potongan SPM Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PNS Desember 2024 s.d Februari 2025	22-Apr-25	00862A	348
4	Pengembalian Belanja Uang makan Tahun Anggaran 2024	22-Apr-25	B9BF961QVD5R7H0 9	3.312.000
5	Pengembalian Belanja Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2024	22-Apr-25	918651JNG89T6GFU	2.442.251
6	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja PPPK TA 2024 atas Temuan	15-Jul-25	DD7637QLV2JAEUO I	792.954

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Dokumen	Nominal
	Sampel Inspektorat pada Bawaslu Kab Banyumas			
7	Potongan SPM Belanja Pegawai	29-Aug-25		32
8	Potongan SPM Belanja Pegawai	18-Nov-25		39
Jumlah				11.828.502

Selanjutnya, rincian realisasi pendapatan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp243.026.560 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Purbalingga	21/05/2025	'5D3843CIFTHKIF49	7.515.000
2	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Brebes	21/05/2025	'981F848VVO40VSJ9	7.162.500
3	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	21/05/2025	E35681JNG8CROVAH	8.120.000
4	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kota Surakarta	21/05/2025	'7DB2C6U8F7R69BF6	17.535.000
5	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Demak	21/05/2025	A6E1661QVD8PP2R7	7.905.000
6	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kudus	21/05/2025	'3D06C6U8F7R664G6	7.407.600
7	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Purworejo	21/06/2025	5E7C11JNG8CROFHM	7.440.000
8	Pengembalian Dobel Bayar Tagihan Telekomunikasi Bulan Oktober 2024	18/02/2025	B54CD0NA0DH8NK1I	4.734.527
9	Pengembalian belanja listrik , transport , honor pokja gakkumdu kota semarang	04/02/2025	AA89E0NA0DH1098K	2.935.000
10	Pengembalian sisa transport piket gakkumdu honor pokja administrasi dan transport bawaslu kota semarang	04/02/2025	'808A31JNG83DD8BS	4.039.500
11	Pengembalian Dobel Bayar Tagihan Listrik Bulan Oktober 2024	21/01/2025	867157QLV21FRAAJ	19.562.361
12	Pengembalian belanja perjalanan dinas bawaslu kab cilacap	15/01/2025	BF77F48VVNNU73L8	34.400
13	Pengembalian belanja paket meeting ladinda bawaslu cilacap	14/01/2025	'653A53CIFT5GM6GQ	3.473.862
14	Pengembalian Belanja Honor Narasumber Kecamatan adipala Bawaslu Kab cilacap	14/01/2025	'9CBDB2G502J495V5	900.000
15	Pengembalian Belanja Inkin Bawaslu Kab.Cilacap TA 2024	14/01/2025	'0540355DFIA9G5D8	2.481.022
16	Pengemb. Belanja Bawaslu Kab. Kendal TA 2024	28/03/2025	764A00NA0DKMHOMM	605.070

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
17	Pengembalian Belanja Barang TA 2024 atas Temuan Sampel Inspektorat pada Bawaslu Kab. Banyumas	15/07/2025	668FF6U8F80U1V5A	6.465.250
18	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Data Pencegahan Online dan Data Partisipasi Kota Magelang 12-13 Desember 2024	28/07/2025	3F3841JNG8J199D1	3.535.000
19	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tiket a.n. Unzila TA 2024	28/07/2025	5E5BA7QLV2JO496D	266.400
20	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas PHPU Tanggal 26 - 31 Desember 2024	28/07/2025	3ED0B0NA0E0KS6VK	3.645.284
21	Pengembalian Belanja Honor PTPS Bawaslu Kota Magelang TA 2024	29/07/2025	BA7181JNG8J196KS	800.000
22	Pengembalian belanja perjalanan dinas atas temuan BPK di Bawaslu Kabupaten Pati	13/10/2025	45A751JNG8RGHVL9	3.042.000
23	Pengembalian Belanja Perjadiin Bawaslu Kab. Sukoharjo TA 2024	17/10/2025	60DA46U8F89UCTJF	14.455.714
24	Pengembalian Belanja Perjadiin TA 2024 Bawaslu Kab. Banyumas	20/10/2025	EFDE02G503E1G4U8	7.749.500
25	Pengembalian Belanja atas Kelebihan Bayar Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah TA 2024	06/11/2025	744A66U8F8CJ2TQL	32.715.000
26	Pengembalian Kelebihan Belanja sewa gedung pembentukan panwascam tahun anggaran 2024 di Bawaslu Kab Boyolali	07/11/2025	6F5831JNG8U8L06N	5.033.059
27	Pengemb. belanja perjadiin Bawaslu Kota Tegal TA 2024	07/11/2025	942DC6U8F8CL94LS	94.000
28	Pengembalian atas kelebihan belanja pembuatan spanduk sosialisasi pembentukan PTPS tahun 2024 di Bawaslu Kab Boyolali	07/11/2025	FC5D11JNG8U8L097	1.037.566
29	Pengembalian kelebihan pembayaran atas honor pokja pemilihan tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Grobogan	07/11/2025	46E808N3ETHBT0EF	2.280.000
30	Pengembalian Belanja atas Kelebihan pembayaran atas Pembuatan id card Panwascam dan PKD Pilkada 2024 di Bawaslu Kabupaten Boyolali	07/11/2025	7ECAE3CIFU31F01P	5.696.952
31	Pengembalian Belanja Barang atas temuan BPK pada tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bapati tahun anggaran 2024 di Bawaslu Kabupaten Boyolali	07/11/2025	539DC1JNG8U8KVT1	6.322.301
32	Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Apel Siaga Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Grobogan	07/11/2025	A8C016U8F8CJ30BT	19.136.000
33	Pengembalia belanja atas temuan inspektorat tahun 2023 di Bawaslu Kab Banyumas	09/12/2025	1F02C55DFJAT6IQ5	1.214.637

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
34	Pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2023 atas temuan inspektorat di Bawaslu Kab Klaten atasnama rizky	10/12/2025	0CD111JNG91CMT27	439.884
35	Setor pengembalian belanja atas temuan inspektorat tahun 2024 di Bawaslu Kota Surakarta	10/12/2025	7DDBA0NA0EF09P5G	1.939.000
36	Pengembalian Pembayaran Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tidak Sesuai Ketentuan tahun 2023 provinsi	12/12/2025	98CC52G503JQ6U3N	593.000
37	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten Demak TA 2024	31/12/2025	C3C232G503K6FVBM	1.242.500
38	Pengembalian Belanja Honor Pokja Isu Negatif TA 2024	14/04/2025	C39A43CIFTEE7jLD	7.480.000
39	Pengemb. selisih Kas Kelebihan input honor Staf Kecamatan Bawaslu Kab.Kendal	22/04/2025	75F402G502S45811	1.500.000
40	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas (Hibah) Bawaslu Provinsi jateng TA 2024	25/04/2025	085DE7QLV2ANCBA5	14.094.271
41	Pengembalian Belanja Pengadaan Daya Tahan Tubuh Bawaslu	25/04/2025	4591455DFIjI716I	398.400
Jumlah				243.026.560

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp50.114.592 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian kelebihan pembayaran renovasi gedung bawaslu kab tegal	12/02/2025	5223C55DFID4JLBF	899.700
2	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Kamar Mandi Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	23/04/2025	BA4156U8F7O6G814	1.840.440
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Interior Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	23/04/2025	A60506U8F7O6G5S9	24.506.561
4	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Halaman Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	25/04/2025	8498848VVO12D9RM	9.248.815
5	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang	24/04/2025	11B701JNG89S2V1V	11.989.619
6	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Demak	27/03/2025	5EB027QLV27OM46N	1.629.457
Jumlah				50.114.592

Rincian pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp3.000.000 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Pendapatan Anggaran Lain-lain

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Setoran Pengembalian Belanja atas temuan BPK Tahun 2009 Klaten	20-JAN-25	AC30F48VVNNRVVN9	1.000.000
2	Setoran Pengembalian Belanja atas temuan BPK Tahun 2009 Klaten	24-JUN-25	FF94E61QVDBQNSU4	500.000
3	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Klaten	10/12/2025	6D1077QLV323FITU	500.000
4	Pengembalian Temuan BPK Bawaslu Kabupaten Klaten TA 2009	07/07/2025	9BEA81JNG8I8BAJ2	1.000.000
Jumlah				3.000.000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp145.322.627.189 atau 92 persen dari anggaran belanja sebesar Rp157.944.026.000,. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

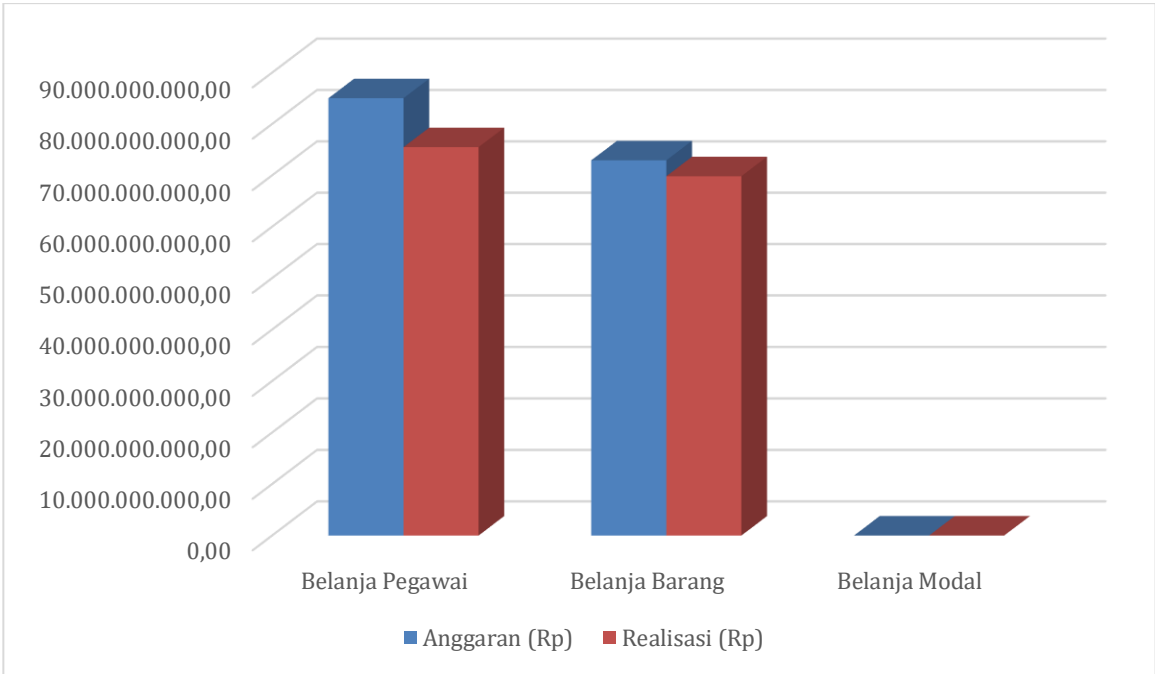
Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	85.020.324.000,	75.488.819.990,	88,79
Belanja Barang	72.923.702.000,	69.833.807.199,	95,76
Belanja Modal	0,	0,	0,00
Jumlah	157.944.026.000,	145.322.627.189,	92,01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1

Realisasi Belanja



Selanjutnya, perbandingan Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Pegawai	75.488.819.990	48.228.177.570	56,5%
Belanja Barang	69.833.807.199	856.896.331.717	-91,9%
Belanja Modal	0	11.294.842.537	-100,0%
Jumlah	145.322.627.189	916.419.351.824	-84,1%

Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 84,1 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sehingga terdapat jajaran adhoc sampai dengan tingkat TPS sedangkan 2025 sudah tidak ada;
- 2 Terdapat pelaksanaan tahapan pilkada serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang hanya sampai dengan tahun anggaran 2024.
- 3 Terdapat realisasi anggaran operasional Panwascam pada tahun anggaran 2024;
- 4 Menurunnya belanja barang sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD 2025.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp75.488.819.990 dan Rp48.228.177.570 atau terjadi kenaikan sebesar 56,5 persen. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Penambahan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yaitu adanya mutasi pegawai dari beberapa Bawaslu Provinsi lain, penambahan realisasi belanja pegawai juga disebabkan adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) yang terlantik pada tahun 2025. Selanjutnya, rincian pagu dan realisasi belanja pegawai secara detail dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	8.045.852.000,	5.946.960.780,	73,91
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.665.000,	84.472,	2,30
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	687.305.000,	353.322.868,	51,41
Belanja Tunj. Anak PNS	254.811.000,	76.709.741,	30,10
Belanja Tunj. Struktural PNS	447.270.000,	307.690.000,	68,79
Belanja Tunj. Fungsional PNS	185.000.000,	173.960.000,	94,03
Belanja Tunj. PPh PNS	619.441.000,	459.335.732,	74,15
Belanja Tunj. Beras PNS	566.406.000,	319.299.780,	56,37
Belanja Uang Makan PNS	1.677.140.000,	1.330.221.000,	79,31
Belanja Tunjangan Umum PNS	374.745.000,	261.635.000,	69,82
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	27.188.308.000,	27.042.074.200,	99,46
Belanja Gaji Pokok PPPK	13.183.889.000,	12.960.091.500,	98,30
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.244.000,	189.333,	3,03
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	952.039.000,	815.481.950,	85,66

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	215.470.000,	204.433.074,	94,88
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	871.330.000,	866.242.500,	99,42
Belanja Tunjangan Beras PPPK	847.466.000,	737.000.235,	86,97
Belanja Uang Makan PPPK	2.803.080.000,	2.567.178.000,	91,58
Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.075.695.000,	457.890.000,	42,57
Belanja Uang Lembur	1.013.845.000,	187.913.000,	18,53
Belanja Uang Lembur PPPK	2.312.793.000,	236.010.000,	10,20
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	8.273.320.000,	7.044.587.877,	85,15
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus / Kegiatan / Kinerja PPPK	13.415.210.000,	13.150.577.591,	98,03
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	(633)	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS	0	(540.000)	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	(1.110.092)	-
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	(8.417.658)	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	(260)	-
Total	85.020.324.000	75.488.819.990	88,79

Berikutnya, penjelasan mengenai kenaikan belanja pegawai antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dijelaskan pada tabel perbandingan realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.227.568.648	4.419.184.224	108,8%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	27.042.074.200	26.643.711.215	1,5%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	18.600.088.674	7.981.255.987	133,0%
Belanja Lembur	423.923.000	70.676.000	499,8%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai PNS PPPK	20.195.165.468	9.113.350.144	121,6%
Jumlah Belanja Pegawai	75.488.819.990	48.228.177.570	56,5%

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.488.819.990 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS dan PPPK Bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional Bulan PNS dan PPPK Januari s.d. Desember 2025;
3. Pembayaran uang makan PNS dan PPPK Bulan Januari s.d. Desember 2025;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2025;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bulan Januari s.d. Desember 2025;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK Bulan Januari s.d. Desember 2025;
7. Pembayaran THR PNS dan PPPK Tahun 2025;
8. Pembayaran Gaji Ketiga Belas PNS Tahun 2025;
9. Pembayaran THR Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2025; dan
10. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 69.833.807.199 dan Rp856.896.331.717. Realisasi belanja barang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 91,9 persen dari tahun sebelumnya, penurunan serta rincian belanja barang tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang

Uraian	Realisasi		Naik/Turun (%)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	9.577.977.709	26.675.615.755	-64,1%
Belanja Barang Non Operasional	14.177.336.587	515.834.146.638	-97,3%
Belanja Jasa	12.611.209.876	72.928.175.949	-82,7%
Belanja Pemeliharaan	1.886.549.684	3.534.086.919	-46,6%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.573.117.343	237.899.737.956	-86,7%
Belanja Barang Persediaan	7.616.000	24.568.500	-69,0%
Total	69.833.807.199	856.896.331.717	-91,9%

Realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp69.833.807.199 bersumber dari APBN dan Hibah. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan mendapat anggaran hibah dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebesar Rp545.260.002.000 dengan pagu anggaran hibah yang dikelola selama tahun anggaran 2025 sebesar Rp61.818.264.000. Selanjutnya, rincian realisasi anggaran menurut sumber dana sebagai berikut:

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber dana Perjenis Belanja Barang Per 31 Desember 2025

No.	Keterangan	Pagu	Realisasi	Prosentase (%)
1	Hibah	41.825.306.000	41.677.184.981	99
2	APBN	31.098.396.000	28.156.622.218	90
Jumlah		72.923.702.000	69.833.807.199	95

Adapun realisasi belanja barang berdasarkan sumber dana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Berdasarkan sumber dana APBN Per 31 Desember 2025

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8.057.535.000,	7.480.081.538,	92,83
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.318.000,	6.244.810,	40,77

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	812.188.000,	692.782.000,	85,3
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.004.800.000,	591.412.650,	58,86
521211	Belanja Bahan	263.490.000,	203.192.987,	77,12
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	128.000.000,	128.000.000,	100,
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000,	7.616.000,	38,08
522111	Belanja Langganan Listrik	1.257.569.000,	867.827.910,	69,01
522112	Belanja Langganan Telepon	73.957.000,	22.348.119,	30,22
522113	Belanja Langganan Air	133.348.000,	73.033.614,	54,77
522141	Belanja Sewa	7.151.774.000,	7.149.713.246,	99,97
522151	Belanja Jasa Profesi	794.000.000,	790.500.000,	99,56
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.632.650.000,	1.215.788.896,	74,47
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	461.773.000,	423.835.786,	91,78
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.766.351.000,	1.358.003.898,	76,88
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	719.847.000,	631.818.565,	87,77
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.940.000,	234.092.000,	91,46
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.570.834.000,	2.499.935.891,	97,24
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.979.022.000,	3.780.394.308,	95,01
	JUMLAH BELANJA BARANG	31.098.396.000	28.156.622.218	90,54

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Berdasarkan sumber dana Hibah Per 31 Desember 2025

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	630.673.000,	628.412.711,	99,64
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	163.676.000,	163.664.000,	99,99
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15.380.000,	15.380.000,	100,
521211	Belanja Bahan	3.411.259.000,	3.398.496.566,	99,63
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10.474.635.000,	10.441.997.034,	99,69
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.650.000,	5.650.000,	100,
522111	Belanja Langganan Listrik	57.511.000,	57.164.402,	99,4

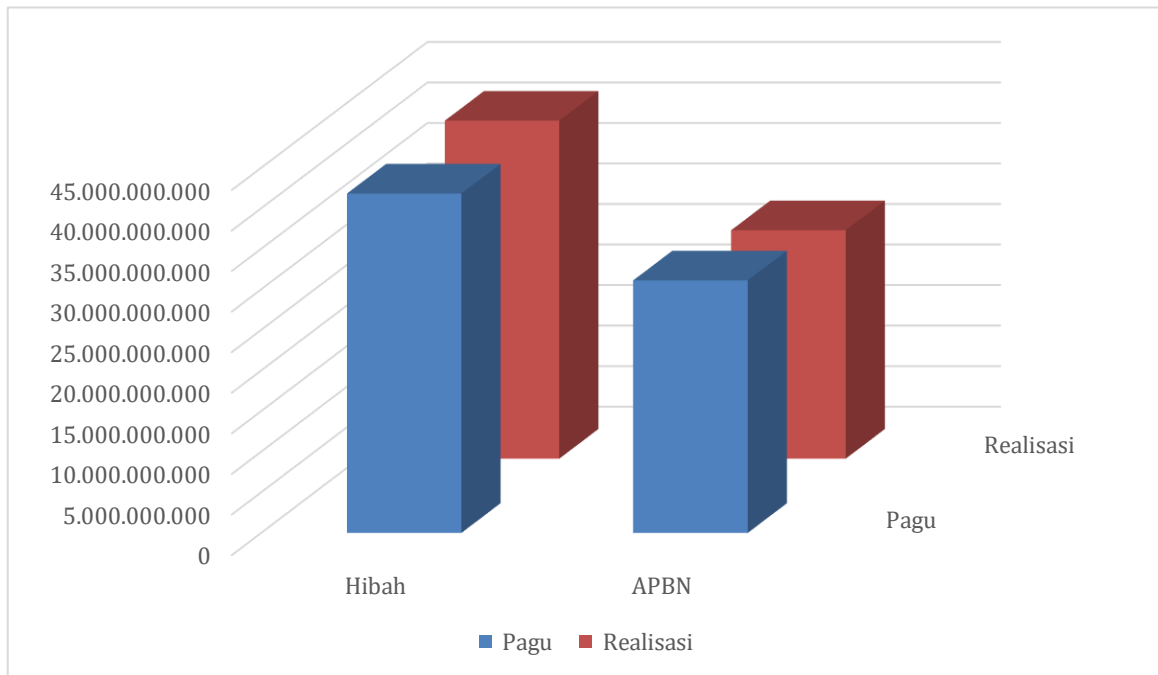
522112	Belanja Langganan Telepon	146.000,	144.700,	99,11
522113	Belanja Langganan Air	10.495.000,	10.477.214,	99,83
522141	Belanja Sewa	1.406.908.000,	1.405.583.000,	99,91
522151	Belanja Jasa Profesi	500.200.000,	499.500.000,	99,86
522191	Belanja Jasa Lainnya	531.496.000,	519.128.775,	97,67
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.270.000,	61.680.000,	99,05
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.030.000,	43.030.000,	100,
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.020.746.000,	6.999.400.435,	99,7
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.245.059.000,	1.240.465.000,	99,63
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.510.050.000,	4.498.315.000,	99,74
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.736.122.000,	11.688.696.144,	99,6
	JUMLAH BELANJA BARANG	41.825.306.000,00	41.677.184.981,00	99,64

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 91 persen dari tahun sebelumnya, hal ini yang disebabkan:

- 1 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sehingga terdapat jajaran adhoc sampai dengan tingkat TPS sedangkan 2025 sudah tidak ada;
- 2 Terdapat pelaksanaan tahapan pilkada serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada tahun anggaran 2024;
- 3 Terdapat peningkatan realisasi anggaran operasional Panwascam pada tahun anggaran 2024;
- 4 Menurunnya belanja barang sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD 2025;

Grafik 2

Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana Jenis Belanja Barang



Saldo sebesar Rp69.833.807.199 digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk:

1. Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Pengawasan Pemilu Partisipatif Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi;
11. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain Belanja, terdapat beberapa Pengembalian Belanja Sewa sebesar Rp5.889.636.843 yang telah disetor ke kas negara pada tanggal 17 Maret 2025 dengan NTPN 951D21GCDBITCAQR.

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.294.842.537. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp535.499.074 dan Rp125.740.865.315. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kuitansi dan Uang Persediaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang Tunai	0
2	Uang di rekening Bank	0
3	Uang muka	0
4	Uang di BPP	0
5	Kuitansi Belum GU	0
6	Jumlah Uang Di Bendahara	0
7	Pajak	0
8	Jumlah Uang di Bendahara Selain Kas	0
9	Saldo Akhir Kas di BP (6-8=9)	0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0 dan Rp125.030.884.314.

C.1.3 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp413.925.110 dan Rp644.855.110. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo belanja dibayar dimuka Tahun 2025 senilai Rp413.925.110 merupakan Saldo belanja dibayar dimuka atas belanja sewa gedung dan tanah.

Adapun rincian saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp413.925.110 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU SEWA	PERIODE		TANGGAL BAYAR	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	PEMBILANGAN BEBAN SEWA		SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 30 Juni 2023
						MULAI	BERAKHIR			JANGKA WAKTU DILALUI (BULAN)	NILAI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L = (K/F)*J	M=J-L
1	Kabupaten Brebes	Sewa Gedung/Kantor untuk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2025	859/PL.03.02/JT-06/05/2025	13/05/2025	12	18/05/2025	19/05/2026	19/05/2025	115.000.000	8	76.666.667	38.333.333
2	Kabupaten Tegal	Sewa Gedung/Kantor untuk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025 Sejak Bulan Desember 2025 s.d Desember 2026	828/PL.03.02/JT-26/12/2025	01/12/2025	12	31/12/2025	31/12/2026	04/12/2025	144.100.000	1	12.008.333	132.091.667
3	Kota Salatiga	Perjanjian Sewa Tanah Dan Bangunan antara Perum Perhutani dengan Bawaslu	32/044.3./PKS/DEPREN/DIVRE JATENG/2025	01/12/2025	12	01/12/2025	30/11/2026	04/12/2025	102.000.120	1	8.500.010	93.500.110
4	Kota Surakarta	Perjanjian Sewa Tanah Dan Bangunan Perseorangan antara Surati Iswandari dengan Bawaslu Kota Surakarta	2568/PL.00.02/JT-34/11/2025	25/11/2025	12	01/01/2026	31/12/2026	02/12/2025	150.000.000	0	0	150.000.000
JUMLAH									511.100.120		97.175.010	413.925.110

Adapun Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 senilai Rp644.855.110 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Uraian Kontrak	Lama (bulan)	Periode		Nilai Sewa (Rp)	Bulan Dilalui	BEBAN SEWA PER 31 Des 2024	SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 31
				Mulai	Berakhir				
<i>b</i>		<i>d</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i>		N=K-M
1	Bawaslu Kota Salatiga	Perjanjian Sewa Aset Tetap Perum Perhutani (Sewa	12	1 Desember 2024	30 November 2025	102.000.120	1	8.500.010	93.500.110
2	Bawaslu Kabupaten Brebes	Perjanjian Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kabupa	12	Mei 2024	Mei 2025	115.000.000	8	76.666.667	38.333.333
3	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengadaan Sewa Peralatan Perkantoran Laptop	8	01 Juni 2024	31 Januari 2025	136.000.000	7	119.000.000	17.000.000
4	Bawaslu Kota Magelang	Perjanjian Sewa Menyewa Meubelair Pada Gedung	6	01 November 2024	30 April 2025	18.000.000	2	6.000.000	12.000.000
5	Bawaslu Kota Magelang	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk Ruang S	6	01 November 2024	30 April 2025	30.000.000	2	10.000.000	20.000.000
6	Bawaslu Kabupaten Kendal	Perjanjian Sewa Gedung Sidang Gakkumdu	9	1 Juni 2024	29 Februari 2025	72.000.000	7	56.000.000	16.000.000
7	Bawaslu Kabupaten Kendal	Perjanjian Sewa Meubelair Gedung Sidang Gakk	9	6 Juni 2024	29 Februari 2025	31.500.000	7	24.500.000	7.000.000
8	Bawaslu Kabupaten Kendal	Perjanjian Sewa Peralatan Kantor Gedung Sidan	9	19 Juni 2024	29 Februari 2025	31.500.000	7	24.500.000	7.000.000
9	Bawaslu Kab Kendal Kecamatan	Sewa Gedung Kantor Panwascam se Kab Ken	8	1 June 2024	31 January 2025	73.200.000	7	64.050.000	9.150.000
10	Bawaslu Kab Kendal Kecamatan	Sewa Meubelair Kantor Panwascam se Kab K	8	1 June 2024	31 January 2025	81.200.000	7	71.050.000	10.150.000
11	Bawaslu Kab Kendal Kecamatan	Sewa Peralatan Kantor Panwascam se Kab Ke	8	1 June 2024	31 January 2025	85.200.000	7	74.550.000	10.650.000
12	Bawaslu Kabupaten Grobogan Kec.	Pengadaan Sewa Peralatan Perkantoran (Laptop	8	June 2024	31 January 2025	228.000.000	7	199.500.000	28.500.000
13	Bawaslu Kab. Demak Kecamatan	Pengadaan Sewa Peralatan Perkantoran (Laptop	8	3 Juni 2024	31 January 2025	145.600.000	7	127.400.000	18.200.000
14	Bawaslu Kab. Demak	Pengadaan sewa meubelair untuk 14 kecamatan	7	8 Juli 2024	31 January 2025	77.420.000	6	66.360.000	11.060.000
15	BAWASLU KABUPATEN DEMAK	SEWA TANAH KANTOR	60	01/01/2021	31 December 2025	125.000.000	48	100.000.000	25.000.000
16	Bawaslu Kabupaten Boyolali	Sewa Peralatan Kecamatan (Laptop dan Printer)	8	Jun	Januari	176.000.000	7	154.000.000	22.000.000
17	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Anggota Badan Pengawas Pemiliha	12	28-May-24	28-May-25	60.000.000	8	40.000.000	20.000.000
18	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Anggota Badan Pengawas Pemiliha	12	28-May-24	28-May-25	60.000.000	8	40.000.000	20.000.000
19	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Anggota Badan Pengawas Pemiliha	12	28-May-24	28-May-25	60.000.000	8	40.000.000	20.000.000
20	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Anggota Badan Pengawas Pemiliha	12	29 Juli 2024	29 Juli 2025	60.000.000	6	30.000.000	30.000.000
21	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Pejabat Administrasi Badan Penga	12	09-Dec-24	09-Dec-25	42.000.000	1	3.500.000	38.500.000
22	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sewa Rumah Pejabat Administrasi Badan Penga	12	09-Dec-24	09-Dec-25	42.240.000	1	3.520.000	38.720.000
23	Bawaslu Kabupaten Tegal	Sewa Gedung Kantor	12	01 Desember 2024	30-Nov-25	144.100.000	1	12.008.333	132.091.667
						1.995.960.120		1.351.105.010	644.855.110

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Nilai pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp49.214.891. Pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 2024 seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke kas negara serta dicatat pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara dan dilakukan jurnal balik pada aplikasi SAKTI Modul GLP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Temuan Pengembalian	Nilai Penyetoran	Tanggal Setor	NTPN
1	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Interior Ruang Tamu dan Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp24.506.561,00	24.506.561	24.506.561	23 April 2025	A60506U8F7O6G5S9
2	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp1.840.440,00	1.840.440	1.840.440	23 April 2025	BA4156U8F7O6G814
3	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Halaman Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp9.248.814,95	9.248.815	9.248.815	25 April 2025	8498848VVO12D9RM
4	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor pada Bawaslu Kabupaten Pemalang Senilai Rp11.989.619,00	11.989.619	11.989.619	24 April 2025	11B701JNG89S2V1V
5	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor pada Bawaslu Kabupaten Demak Senilai Rp1.629.456,15	1.629.456	1.629.457	27 Maret 2025	5EB027QLV27OM46N
Total		49.214.891	49.214.892		

C.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp121.573.964 dan Rp15.911.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik (Turun)
Barang Konsumsi	121.573.964	15.911.000	664%
	121.573.964	15.911.000	664%

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan hasil Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Nomor 187/PL.09/JT/12/2025 tanggal 31 Desember 2025. Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai
1.	Tipe X	3	Buah	18.000
2.	Map L	5	Pak	82.500
3.	Business File	2	Pak	53.000
4.	Gunting T	10	Buah	85.000
5.	Stapler Kenko 10	5	Buah	47.500
6.	Kertas F4 70 gr	50	Rim	2.675.000
7.	Kertas A4	10	Rim	475.000
8.	Kertas F4 Warna Biru	2	Rim	160.000
9.	Sign Here	10	Pad	225.000
10.	Cetakan Buku Eviden Pengawas AD Hoc	445	Buah	34.265.000
11.	Cetakan Buku Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	441	Buah	33.075.000
12.	Cetakan Buku Jejak Penegakan Keadilan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	214	Buah	14.552.000
13.	Cetakan Buku Ragam Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada	162	Buah	11.826.000
14.	Cetakan Buku Jejak Pengawasan Pilkada 2024 dalam Lensa	119	Buah	9.389.100
15.	Cetakan Buku Menyelesaikan Sengketa Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	139	Buah	10.425.000
16.	Cetakan Buku Mitigasi Demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi	16	Buah	2.100.864
17.	Tinta Printer	10	Buah	975.000
18.	Mouse Komputer	5	Buah	792.500
19.	Baterai Alkaline AA	5	Pak	180.000
20.	Baterai Alkaline AAA	5	Pak	172.500
Jumlah Barang Konsumsi				121.573.964

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024	15.911.000
Mutasi tambah:	
Belanja barang Persediaan Konsumsi	123.248.964
Mutasi kurang:	
Pemakaian Barang Persediaan	17.586.000
Saldo per 31 Desember 2025	121.573.964

Mutasi tambah pembelian persediaan senilai Rp123.248.964 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2025

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
1.	Tipe X	3	18.000
2.	Map L	5	82.500
3.	Business File	2	53.000
4.	Gunting T	10	85.000
5.	Stapler Kenko 10	5	47.500
6.	Kertas F4 70 gr	50	2.675.000
7.	Kertas A4	10	475.000
8.	Kertas F4 Warna Biru	2	160.000
9.	Sign Here	10	225.000
10.	Cetakan Buku Eviden Pengawas AD Hoc	445	34.265.000
11.	Cetakan Buku Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	441	33.075.000
12.	Cetakan Buku Jejak Penegakan Keadilan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	214	14.552.000
13.	Cetakan Buku Ragam Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada	162	11.826.000
14.	Cetakan Buku Jejak Pengawasan Pilkada 2024 dalam Lensa	119	9.389.100
15.	Cetakan Buku Menyelesaikan Sengketa Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah	139	10.425.000
16.	Cetakan Buku Mitigasi Demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi	16	2.100.864
17.	Tinta Printer	10	975.000
18.	Mouse Komputer	5	792.500
19.	Baterai Alkaline AA	5	180.000
20.	Baterai Alkaline AAA	5	172.500
Jumlah		50	2.650.000

Mutasi kurang pemakaian persediaan senilai Rp17.586.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Mutasi Kurang Persediaan per 31 Desember 2025

NO	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1.	Bolpoint Tlz0 0.5	7	182.000
2.	Bolpoint Tlz 1.0 Hitam	4	192.000
3.	Binder Clip No. 105	60	195.000
4.	Paper Clip No.3	2	45.000
5.	Binder Clip No.111	60	300.000
6.	Staples	4	38.000
7.	Isi Staples	5	90.000
8.	Kardus Arsip	1.957	13.699.000
9.	Kertas HVS	15	795.000
Jumlah		2.114	15.536.000

C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp16.542.208.432 dan Rp22.423.939.205. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.132.877.000 dan Rp5.132.877.000. Rincian nilai tanah sebesar Rp5.132.877.000 terdiri dari:

1. Tanah sebesar Rp551.250.000 adalah sebuah tanah milik Kementerian Keuangan yang dihibahkan ke Bawaslu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.6/KN.5/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara Idle pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. maka telah ditetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengguna BMN eks BMN Idle berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Bukit Kusuma No.1. Desa Sumurboto. Kecamatan Banyumanik. Semarang. Jawa Tengah. Serah terima tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor KPKNL Semarang selaku Pengelola Barang kepada Kepala Bagian Umum. Biro Administrasi Bawaslu a.n. Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang sesuai BAST BMN eks BMN Idle dengan Nomor BAST-001/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 18 Juni 2019. Selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendapatkan transfer masuk atas aset pada aplikasi SAKTI sebesar Rp551.250.000.
2. Tanah sebesar Rp4.581.627.000 adalah sebuah tanah milik Kementerian keuangan C.q Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sesuai dengan Berita Acara Serah Terima alih status barang milik negara berupa tanah dan bangunan pada kementerian keuangan c.q kantor pelayanan pajak pratama Pati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum c.q. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai dengan Nomor BA-24/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya Berdasarkan berita acara transfer barang milik negara dari sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilahan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/PL.09/KB/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.654.468.832 dan Rp43.892.607.897.

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.654.468.832 secara lengkap disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Kelompok Jurnal	Keterangan	Kuantitas	Jumlah
132111	Peralatan dan Mesin		
3010304001	Transportable Generating Set	30,	646.800.000,
3060102158	Monopod	1,	1.750.000,

Kelompok Jurnal	Keterangan	Kuantitas	Jumlah
132111	Peralatan dan Mesin		
3060101098	Mixer Sound Sistem	7,	14.640.750,
3060101037	Microphone/Boom Stand	2,	1.000.000,
3050206045	Coffee Maker	1,	14.450.000,
3050206007	Loudspeaker	3,	23.437.500,
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	34,	432.317.500,
3100204001	Server	1,	14.154.000,
3050204006	Kipas Angin	2,	3.490.000,
3050105017	Mesin Absensi	31,	90.251.500,
3050206080	Bracket Standing Peralatan	1,	3.100.000,
3060101002	Audio Mixing Portable	1,	3.950.000,
3050204001	Lemari Es	15,	30.589.000,
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	3,	8.435.000,
3100102003	Note Book	2,	68.154.000,
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1,	1.150.000,
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	30,	48.057.600,
3060102128	Camera Digital	77,	1.330.715.500,
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	100,	1.690.724.600,
3050206071	Kabel	1,	2.500.000,
3050206037	Mimbar/Podium	1,	3.930.000,
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	293,	1.019.516.476,
3050206014	Microphone	9,	23.895.000,
3190103010	Treadmill	0,	0,
3060102167	Drone	4,	29.033.402,
3060102022	Video Caption Adder	2,	2.400.000,
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	32,	64.739.000,
3060101041	Professional Sound System	1,	5.000.000,
3020202001	Sepeda	15,	67.304.000,
3060105047	Kamera Udara	0,	0,
3060101091	Digital LED Running Text	0,	0,
3100203002	Monitor	33,	81.910.000,
3050201016	Kasur/Spring Bed	1,	1.200.000,
3100102002	Lap Top	368,	5.992.932.758,
3060102170	Gimbal Tripod	1,	1.800.000,
3060101036	Microphone/Wireless MIC	12,	29.522.500,
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1,	1.950.000,
3100102001	P.C Unit	436,	6.278.905.100,
3050206002	Televisi	42,	266.581.935,
3060201015	Telepon Lapangan	5,	18.669.500,
3060101033	Set Studio Light Signal	2,	3.589.632,
3190102001	Alat Tennis Meja	3,	7.825.000,
3100204024	Switch	4,	7.685.000,
3050104001	Lemari Besi/Metal	390,	1.175.385.600,
3020101003	Station Wagon	8,	5.102.000.000,
3050201005	Sice	37,	222.613.500,
3050105010	White Board	4,	5.050.000,
3050206046	Handy Cam	87,	714.144.000,
3050206016	Mic Conference	2,	181.750.000,
3030102008	Mesin Gergaji Besi	1,	1.545.000,
3100203017	External/ Portable Hardisk	25,	82.134.000,
3020104001	Sepeda Motor	5,	82.136.000,

Kelompok Jurnal	Keterangan	Kuantitas	Jumlah
132111	Peralatan dan Mesin		
3100204015	Firewall	1,	34.500.000,
3050105015	Alat Penghancur Kertas	3,	7.400.000,
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7,	2.620.766.000
3060201004	Telephone Mobile	25,	339.330.999,
3060201020	Telepon Digital	211,	237.426.100,
3100201012	Hard Disk	1,	5.000.000,
3050104020	Lemari Display	8,	58.930.000,
3050201008	Meja Rapat	213,	1.100.150.000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	1,	3.000.000,
3050201014	Meja Resepsionis	1,	9.150.000,
3060102132	Video Conference	1,	18.050.000,
3060102159	Clipp On	13,	49.083.348,
3060103999	Peralatan Studio Gambar Lainnya	0,	0,
3050104004	Rak Kayu	1,	3.000.000,
3050206031	Pataka	2,	2.370.000,
3050204004	A.C. Split	268,	1.116.721.900
3050201003	Kursi Besi/Metal	1.077,	1.333.658.700
3050206020	Camera Video	4,	28.075.000,
3050206013	Megaphone	1,	800.000,
3100102009	Tablet PC	14,	137.152.000,
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	30,	103.320.000,
3050206068	DVD Player	1,	12.500.000,
3050104002	Lemari Kayu	2,	6.250.000,
3050204002	A.C. Sentral	2,	49.600.000,
3060101088	Voice Recorder	32,	61.925.000,
3050206008	Sound System	33,	438.281.500,
3100204042	VGA	1,	2.358.750,
3050201004	Kursi Kayu	4,	2.000.000,
3050206035	Kaca Hias	4,	2.600.000,
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	22,	30.800.000,
3060102118	Head Set	6,	13.595.000,
3100204026	Acces Point	3,	1.564.200,
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2,	9.210.000,
3050104007	Brandkas	30,	62.080.000,
3050206019	Stabilisator	2,	10.550.000,
3100204002	Router	0,	0,
3050206036	Dispenser	7,	12.350.000,
3060102061	Lensa Kamera	13,	96.894.800,
3050104005	Filing Cabinet Besi	66,	212.403.000,
3060101031	Intercom Unit	6,	7.200.000,
3060201010	Facsimile	2,	3.842.500,
3050206005	Amplifier	1,	1.250.000,
3050203002	Mesin Pel/Poles	2,	5.500.000,
3050201002	Meja Kerja Kayu	585,	2.447.629.982
3060102055	Lighting Stand Tripod	2,	4.100.000,
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5,	29.740.000,
3050105048	LCD Projector/Infocus	60,	588.523.900,
3060102130	Lampu Blitz Kamera	2,	4.000.000,
3060102045	Tripod Camera	34,	85.640.000,
3060201003	Pesawat Telephone	31,	226.884.300,
3050105001	Tabung Pemadam Api	1,	3.300.000,

Kelompok Jurnal	Keterangan	Kuantitas	Jumlah
132111	Peralatan dan Mesin		
3060102135	LCD Monitor	3,	8.897.500,
3050104003	Rak Besi	20,	100.300.000,
	Jumlah	5.033	37.654.468.832

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.716.502.224 dan Rp1.716.502.224. Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebuah Gedung / Bangunan milik Kementerian Keuangan yang dihibahkan ke Bawaslu sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.6/KN.5/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. maka telah ditetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengguna BMN eks BMN *Idle* berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Bukit Kusuma No.1. Desa Sumurboto. Kecamatan Banyumanik. Semarang. Jawa Tengah. yang selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi aset milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp247.740.000.
- Berita Acara Nomor BA-24/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya Berdasarkan berita acara transfer barang milik negara dari sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilahan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/PL.09/KB/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 senilai Rp1.284.066.000 berupa bangunan di kabupaten Pati. Atas bangunan tersebut dilakukan renovasi yang menambah nilai gedung dan bangunan senilai Rp184.696.224, sehingga total nilai bangunan tersebut adalah sebesar Rp1.468.762.224.

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan aset tetap lainnya yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 31 Desember 2025. Aset Tetap Lainnya merupakan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar Rp1.225.353.888 di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Rincian dan penjelasan aset tetap berstatus renovasi bangunan adalah sebagai berikut

Kode	Nama Barang	Bawaslu Kab/Kota	Nilai (Rp)
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	ATR Gedung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	61.467.958
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	473.702.439

Kode	Nama Barang	Bawaslu Kab/Kota	Nilai (Rp)
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Bawaslu Kab Pemalang	184.944.122
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Bawaslu Kab Pekalongan	193.987.007
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi Bawaslu Provinsi (Kamar Mandi)	62.593.992
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	ATR Reward Bank Jateng	248.658.370
	Total		1.225.353.888

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar minus Rp29.186.993.512 dan minus Rp29.924.646.304.

Tabel 10. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI PENYUSUTAN
132111	Peralatan dan Mesin		5.733	(26.821.321.526)
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	30,	(646.800.000,)
3020101003	Station Wagon	Unit	8,	(1.093.285.713,)
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	7,	(2.620.766.000,)
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5,	(63.305.286,)
3020202001	Sepeda	Unit	15,	(67.304.000,)
3030102008	Mesin Gergaji Besi	Buah	1,	(309.000,)
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	1,	(1.950.000,)
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1,	(3.000.000,)
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	390,	(1.174.005.600,)
3050104002	Lemari Kayu	Buah	2,	(6.250.000,)
3050104003	Rak Besi	Buah	20,	(98.500.000,)
3050104004	Rak Kayu	Buah	1,	(3.000.000,)
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	66,	(210.971.500,)
3050104007	Brandkas	Buah	30,	(62.080.000,)
3050104020	Lemari Display	Buah	8,	(58.930.000,)
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	1,	(3.300.000,)
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	34,	(224.987.500,)
3050105010	White Board	Buah	4,	(5.050.000,)
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3,	(7.400.000,)
3050105017	Mesin Absensi	Buah	31,	(90.251.500,)
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	60,	(373.043.900,)
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	32,	(63.242.300,)
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	585,	(2.439.404.982,)
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1.077,	(1.332.458.700,)

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI PENYUSUTAN
3050201004	Kursi Kayu	Buah	4,	(2.000.000,)
3050201005	Sice	Buah	37,	(204.244.500,)
3050201008	Meja Rapat	Buah	213,	(1.089.130.000,)
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1,	(9.150.000,)
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1,	(480.000,)
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	22,	(30.800.000,)
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2,	(8.364.000,)
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	2,	(5.500.000,)
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	3,	(6.314.000,)
3050204001	Lemari Es	Buah	15,	(17.965.000,)
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2,	(49.600.000,)
3050204004	A.C. Split	Buah	268,	(953.663.100,)
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	5,	(10.171.000,)
3050204006	Kipas Angin	Buah	2,	(1.990.000,)
3050206002	Televisi	Buah	42,	(225.272.010,)
3050206005	Amplifier	Buah	1,	(500.000,)
3050206007	Loudspeaker	Buah	3,	(17.137.500,)
3050206008	Sound System	Buah	33,	(422.257.500,)
3050206013	Megaphone	Buah	1,	(800.000,)
3050206014	Microphone	Buah	9,	(8.384.400,)
3050206016	Mic Conference	Buah	2,	(175.750.000,)
3050206019	Stabilisator	Buah	2,	(5.560.000,)
3050206020	Camera Video	Buah	4,	(28.075.000,)
3050206031	Pataka	Buah	2,	(948.000,)
3050206035	Kaca Hias	Buah	4,	(2.600.000,)
3050206036	Dispenser	Buah	7,	(6.246.000,)
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1,	(3.930.000,)
3050206045	Coffee Maker	Buah	1,	(5.780.000,)
3050206046	Handy Cam	Buah	87,	(343.823.100,)
3050206068	DVD Player	Buah	1,	(12.500.000,)
3050206071	Kabel	Buah	1,	(2.500.000,)
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1,	(930.000,)
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1,	(3.950.000,)
3060101031	Intercom Unit	Buah	6,	(7.200.000,)
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	2,	(3.589.632,)
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	12,	(17.353.000,)
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2,	(1.000.000,)
3060101041	Professional Sound System	Buah	1,	(5.000.000,)
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1,	(1.150.000,)
3060101088	Voice Recorder	Buah	32,	(61.925.000,)
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	0,	0,
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	7,	(5.010.800,)
3060102022	Video Caption Adder	Buah	2,	(2.400.000,)
3060102045	Tripod Camera	Buah	34,	(84.504.000,)
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2,	(1.345.000,)
3060102061	Lensa Kamera	Buah	13,	(64.947.920,)
3060102118	Head Set	Buah	6,	(4.558.500,)
3060102128	Camera Digital	Buah	77,	(625.860.400,)

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI PENYUSUTAN
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2,	(4.000.000,)
3060102132	Video Conference	Buah	1,	(9.025.000,)
3060102135	LCD Monitor	Buah	3,	(8.897.500,)
3060102158	Monopod	Buah	1,	(1.750.000,)
3060102159	Clipp On	Buah	13,	(36.413.840,)
3060102167	Drone	Buah	4,	(21.257.360,)
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1,	(720.000,)
3060103999	Peralatan Studio Gambar Lainnya	dummy	0,	0,
3060105047	Kamera Udara	Buah	0,	0,
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	31,	(226.884.300,)
3060201004	Telephone Mobile	Buah	25,	(138.182.200,)
3060201010	Facsimile	Buah	2,	(3.842.500,)
3060201015	Telepon Lapangan	Buah	5,	(18.669.500,)
3060201020	Telepon Digital	Buah	211,	(237.426.100,)
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	30,	(30.996.000,)
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	30,	(48.057.600,)
3100102001	P.C Unit	Buah	436,	(4.932.338.025,)
3100102002	Lap Top	Buah	368,	(4.479.001.258,)
3100102003	Note Book	Buah	2,	(25.557.750,)
3100102009	Tablet PC	Buah	14,	(109.403.500,)
3100201012	Hard Disk	Buah	1,	(3.750.000,)
3100203002	Monitor	Buah	33,	(49.341.250,)
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	293,	(813.208.351,)
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	100,	(1.415.615.850,)
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	25,	(69.047.375,)
3100204001	Server	Buah	1,	(14.154.000,)
3100204002	Router	Buah	0,	0,
3100204015	Firewall	Buah	1,	(21.562.500,)
3100204024	Switch	Buah	4,	(7.685.000,)
3100204026	Acces Point	Buah	3,	(1.564.200,)
3100204042	VGA	Buah	1,	(1.179.376,)
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	3,	(6.991.667,)
3190103010	Treadmill	Buah	0,	0
133111	Gedung dan Bangunan			
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	1	(1.085.606.861)
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	8	(173.109.306)
JUMLAH			5.042,	(29.186.993.512)

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.494.752 dan Rp29.461.719. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya. Terjadinya penurunan saldo

aset lainnya dari Rp29.461.719 menjadi Rp6.494.752 disebabkan oleh penyusutan dan amortisasi aset terkait.

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp3.659.670 dan Rp993.406.561. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa lisensi. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Uraian Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
1	Lisensi		3.659.670
Jumlah			3.659.670

C.3.2 Aset Lain – Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp893.871.891 dan Rp446.534.905. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan tanggal 30 September 2024 telah dilakukan pemindahbukuan/penghapusan pada bulan Desember 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 42 ayat 1 bahwa BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya:

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. tidak disajikan dalam neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan

Berikutnya, pada triwulan IV tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

KODE	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5.500.800
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	10	47.565.351
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	7	6.297.500
3050204004	A.C. Split	Buah	5	31.120.100
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	4.800.000
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	1	500.000
3060102128	Camera Digital	Buah	2	15.800.000
3100102001	P.C Unit	Buah	13	133.920.000
3100102002	Lap Top	Buah	14	159.099.994
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	41.409.760
3100204026	Acces Point	Buah	1	521.400
JUMLAH			69	446.534.905

Selanjutnya pada tahun 2025, terdapat aset tak berwujud berupa website yang dilakukan reklasifikasi menjadi aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
1	Website Utama Bawaslu Sukoharjo	http://sukoharjo.bawaslu.go.id	23.500.000
2	Website Utama Bawaslu Kab Semarang	http://semarangkab.bawaslu.go.id	10.000.000
3	Website Utama Bawaslu Kab Klaten	http://klaten.bawaslu.go.id	6.600.000
4	Website Utama Bawaslu Kab Kudus	http://kudus.bawaslu.go.id	38.560.500
5	Website Utama Bawaslu Kab Rembang	http://rembang.bawaslu.go.id	7.000.000
6	Website Utama Bawaslu Kota Semarang	http://semarangkota.bawaslu.go.id	14.900.000
7	Website Utama Bawaslu Kab Pemalang	http://pemalang.bawaslu.go.id	15.000.000
8	Website Utama Bawaslu Kab Boyolali	http://boyolali.bawaslu.go.id	11.000.000
9	Website Utama Bawaslu Kab Pekalongan	http://pekalongankab.bawaslu.go.id	13.500.000
10	Website Utama Bawaslu Kota Pekalongan	http://pekalongankota.bawaslu.go.id	19.500.000
11	Website Utama Bawaslu Kab Cilacap	http://cilacap.bawaslu.go.id	17.450.000
12	Website PPID Bawaslu Kab Klaten	http://klaten.bawaslu.go.id	15.400.000
13	Website Utama Bawaslu Kota Surakarta	http://surakarta.bawaslu.go.id	38.200.000
14	Website Utama Bawaslu Kab Blora	http://blora.bawaslu.go.id	23.800.000
15	Website Utama Bawaslu Kab Temanggung	http://temanggung.bawaslu.go.id	32.450.000
16	Website Utama Bawaslu Kab Banyumas	http://banyumas.bawaslu.go.id	18.500.000
17	Website Utama Bawaslu Kab Purbalingga	http://purbalingga.bawaslu.go.id	11.557.500
18	Website Utama Bawaslu Kab Wonogiri	http://wonogiri.bawaslu.go.id	18.500.000
19	Website Utama Bawaslu Kota Magelang	http://magelangkota.bawaslu.go.id	17.250.000
20	Website Utama Bawaslu Kab Kebumen	http://kebumen.bawaslu.go.id	5.000.000
21	Website Utama Bawaslu Kab Wonosobo	http://wonosobo.bawaslu.go.id	23.956.363

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
22	Website Utama Bawaslu Kab Pati	http://pati.bawaslu.go.id	6.000.000
23	Website Utama Bawaslu Kab Brebes	http://brebes.bawaslu.go.id	14.000.000
24	Website Utama Bawaslu Kab Sragen	http://sragen.bawaslu.go.id	5.575.000
25	Website Utama Bawaslu Kota Salatiga	http://salatiga.bawaslu.go.id	29.500.000
26	Website Utama Bawaslu Kota Tegal	http://tegalkota.bawaslu.go.id	29.228.528
27	Website Utama Bawaslu Kab Jepara	http://jepara.bawaslu.go.id	34.750.000
28	Website Utama Bawaslu Kab Purworejo	http://purworejo.bawaslu.go.id	22.000.000
29	Web PPID Kab Pekalongan	http://ppid.pekalongankab.bawaslu.go.id	10.000.000
30	Web PPID Kab Pati	http://ppid.pati.bawaslu.go.id	27.000.000
31	Web PPID Kab Pemalang	http://ppid.pemalang.bawaslu.go.id	22.500.000
32	Web PPID Kab Tegal	http://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id	4.500.000
33	Web PPID Kab Semarang	http://ppid.semarangkab.bawaslu.go.id	10.500.000
34	Web PPID Kab Rembang	http://ppid.rembang.bawaslu.go.id	9.500.000
35	Web PPID Kab Sragen	http://ppid.sragen.bawaslu.go.id	16.500.000
36	Web PPID Bawaslu Prov Jateng	http://ppid.bawaslujateng.go.id	11.800.000
37	E Library Bawaslu Jateng	http://e-library.bawaslujateng.go.id	11.800.000
38	Web Utama Kab Batang	http://batang.bawaslu.go.id	8.500.000
39	Web PPID Kab Batang	http://ppid.batang.bawaslu.go.id	23.000.000
40	Web Utama Kab Magelang	http://magelangkab.bawaslu.go.id	16.830.000
41	Web PPID Kab Kendal	http://ppid.kendal.bawaslu.go.id	37.000.000
42	Web PPID Kab Purbalingga	http://ppid.purbalingga.bawaslu.go.id	5.000.000
43	Web PPID Kab Brebes	http://ppid.brebes.bawaslu.go.id	10.000.000
44	Web Utama Kab Banjarnegara	http://banjarnegara.bawaslu.go.id	18.000.000
45	Web PPID Kab Grobogan	http://grobogan.bawaslu.go.id	6.000.000

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
46	Web PPID Kab Karanganyar	http://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id	18.300.000
47	Web PPID Kab Boyolali	http://ppid.boyolali.bawaslu.go.id	11.000.000
48	Web PPID Kota Semarang	http://ppid.semarangkota.bawaslu.go.id	11.500.000
49	Aplikasi PPID Kab Rembang	http://ppid.rembang.bawaslu.go.id	5.669.000
50	Web PPID Kota Pekalongan	http://ppid.pekalongankota.bawaslu.go.id	12.500.000
51	Web PPID Kab Demak	http://ppid.demak.bawaslu.go.id	14.800.000
52	Web PPID Kab Banjarnegara	http://ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id	15.000.000
53	Web PPID Kab Wonogiri	http://ppid.wonogiri.bawaslu.go.id	10.670.000
54	Web PPID Kab Cilacap	http://ppid.cilacap.bawaslu.go.id	13.750.000
55	Web PPID Kab Grobogan	http://ppid.grobogan.bawaslu.go.id	6.000.000
56	Web Sareng Bawaslu	http://sareng.bawaslu.go.id	25.000.000
57	Web Siganteng	http://siganteng.bawaslu.go.id	10.000.000
58	Web Simedia	https://simedia.jateng.bawaslu.go.id	24.950.000
59	Web Simedia pengembangan	https://simedia.jateng.bawaslu.go.id/	10.000.000
60	Website Kota Semarang	https://semarangkota.bawaslu.go.id/	15.000.000
61	Website Provinsi	https://jateng.bawaslu.go.id/	14.500.000
JUMLAH			893.871.891

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp891.036.809 dan minus Rp1.410.479.747. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Software	890.121.891	965.371.891
2	Lisensi	914.918	548.951
3	Aset Lain-lain	0	444.558.905
Total		891.036.809	1.410.479.747

Selanjutnya penjelasan mengenai mutasi penyusutan amortisasi aset lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13. Mutasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo awal:	1.410.479.747
Mutasi Tambah:	
Amortisasi Lisensi	365.967
Mutasi Kurang:	
Amortisasi Aset Lain-lain	444.558.905
Amortisasi Software	75.250.000
Total	519.808.905
Saldo per 31 Desember 2025	891.036.809

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp66.330.520 dan Rp216.519.919.

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp66.330.520 dan Rp216.519.919. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

Tabel 14. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	19.219.821,
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	47.110.699,
Jumlah		66.330.520

Berdasarkan tabel di atas, terdapat belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp66.330.520 belanja tersebut merupakan:

No.	Akun	Keterangan	Nilai
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.084.804
2	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	603.900

No.	Akun	Keterangan	Nilai
3	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.069.117
4	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	462.000
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Internet)	14.991.770
6	522111	Belanja Langganan Listrik	26.472.101
7	522112	Belanja Langganan Telepon	845.380
8	522113	Belanja Langganan Air	4.801.448
Total			66.330.520

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Utang tersebut biasanya merupakan kewajiban yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS serta Kuitansi yang sudah dicatat namun belum dibuatkan SPP sampai dengan periode pelaporan.

Tabel 15. Utang Yang Belum Ditagihkan Per 31 Desember 2025

No.	Rincian	Jumlah (Rp)
1	-	0
Jumlah		0

C.4.2 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Sebelumnya, nilai tersebut merupakan total belanja hibah yang sudah diterima ditahun 2024 namun belum dilakukan pengesahan pendapatannya. Per 31 Desember 2025, semua pendapatan hibah sudah disahkan.

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN yaitu terdiri dari UP Tunai yang dikelola BP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

C.4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang jangka pendek adalah suatu pinjaman uang sebagai kewajiban yang wajib dibayarkan dan sifatnya untuk keperluan dana darurat. Selain itu, utang ini juga mempunyai jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 17.011.237.754 dan Rp 147.977.746.320. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp17.084.202.258 dan kewajiban sebesar Rp72.964.504. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Adapun perbandingan Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Ekuitas	17.011.237.754	147.977.746.320	(88,5)
Jumlah	17.011.237.754	147.977.746.320	(88,5)

Adapun Perubahan Ekuitas pada tahun 2025 hingga bulan Desember ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Perubahan Ekuitas Tahun 2025

Ekuitas Awal	147.977.746.320
Surplus/Defisit LO	(149.662.950.544)
Koreksi yang mengurangi ekuitas	(83.434.704.973)
Transaksi Antar Entitas	102.131.146.951
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(130.966.508.566)
Ekuitas Akhir	17.017.237.754

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.005.038 dan Rp63.490.299 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.005.038	63.490.299	(95,27)
Jumlah Pendapatan	3.005.038	63.490.299	(95,27)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.005.038 merupakan pendapatan yang disebabkan oleh Tindak Lanjut Temuan BPK atas pemeriksaan Pilkada 2008 pada Tahun 2009 yang bersumber dari dana Hibah serta adanya Bunga Jasa Giro yang timbul pada Rekening Dana Pemerintah (RDP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Uraian	2025	2024	%Naik/Turun
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.038	7.201.980	-100%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.000.000	900.000	233%
Jumlah Belanja	3.005.038	8.101.980	

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp3.005.038 sudah disetorkan seluruhnya ke kas negara , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Giro
- Pendapatan jasa giro sejumlah Rp 5.038 merupakan setor jasa giro dari rekening kecamatan di wilayah Bawaslu Kabupaten Kendal dengan Nomor NTPN 0AFBC0NA0DEKHVD8
2. Pendapatan anggaran lain-lain

Tabel 41. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Setoran Pengembalian Belanja atas temuan BPK Tahun 2009 Klaten	20/01/2025	AC30F48VVNNRVVN9	1.000.000
2	Setoran Pengembalian Belanja atas temuan BPK Tahun 2009 Klaten	24/06/2025	FF94E61QVDBQNSU4	500.000
3	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Klaten	10/12/2025	6D1077QLV323FITU	500.000
4	Pengembalian Temuan BPK Bawaslu Kabupaten Klaten TA 2009	07/07/2025	9BEA81JNG8I8BAJ2	1.000.000
Jumlah				3.000.000

Terdapat perbedaan/selisih antara Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA dan LO sebesar Rp307.974.692 dan Rp3.005.038, terkait selisih tersebut dijelaskan pada tabel mutasi sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

LRA:	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.038
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.828.502
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	243.026.560
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	50.114.592
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.000.000
Jumlah Pendapatan LRA	307.974.692
Mutasi Kurang	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.828.502
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	243.026.560
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	50.114.592
Jumlah Mutasi Kurang	304.969.654
Pendapatan LO	3.005.038

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp75.508.039.811 dan Rp48.228.177.570 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	5.951.045.584	3.151.144.598	88,85
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	83.839,	40.448,	107,28
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	353.322.868,	195.946.640,	80,32
511122	Beban Tunj. Anak PNS	76.709.741,	43.382.916,	76,82
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	307.150.000,	192.980.000,	59,16
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	174.563.900,	92.110.000,	89,52
511125	Beban Tunj. PPh PNS	459.335.732,	234.268.482,	96,07
511126	Beban Tunj. Beras PNS	319.299.780,	153.313.140,	108,27
511129	Beban Uang Makan PNS	1.330.221.000,	261.493.000,	408,70
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	260.524.908,	94.505.000,	175,67
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	27.042.074.200,	26.643.711.215,	1,50
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	12.965.742.959,	5.824.338.086,	122,61
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	189.073,	77.245,	144,77
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	815.481.950,	341.551.320,	138,76
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	204.433.074,	75.884.560,	169,40
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	866.242.500,	563.825.000,	53,64
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	737.000.235,	300.398.326,	145,34
511628	Beban Uang Makan PPPK	2.567.178.000,	787.691.450,	225,91
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	457.890.000,	87.490.000,	423,36
512211	Beban Uang Lembur	187.913.000,	70.676.000,	165,88
512212	Beban Uang Lembur PPPK	236.010.000,	0,	100,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7.045.049.877,	3.155.255.516,	123,28
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13.150.577.591,	5.958.094.628,	120,72
JUMLAH		75.508.039.811	48.228.177.570	56,56

Kenaikan Beban Pegawai senilai 56,56 persen disebabkan oleh adanya penambahan pegawai yaitu dari pengadaan PPPK dan CPNS tahun 2025. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Pegawai pada LO dan jumlah realisasi Belanja Pegawai pada LRA per 31 Desember 2025, yaitu keduanya bernilai sebesar Rp75.508.039.811 dan Rp75.488.819.990 sehingga terdapat selisih sebesar Rp19.219.821 berupa jurnal akrual pembayaran kekurangan kenaikan gaji berkala yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 22. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Per 31 Desember 2025

Nomor	Akun	Uraian akun	Nilai
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.084.804
2	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	603.900
3	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.069.117
4	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	462.000
		Jumlah	19.219.821

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.586.000 dan Rp29.793.000.

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	17.586.000,	29.793.000,	(40,97)
Jumlah	17.586.000,	29.793.000,	(40,97)

Berdasarkan saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2025 di atas. terdapat selisih antara Beban Persediaan pada Laporan Operasional sebesar Rp17.586.000 dibandingkan dengan Belanja Barang Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.616.000. Penjelasan mengenai selisih tersebut dituangkan ke dalam mutasi nilai persediaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. Mutasi Beban Persediaan

Saldo Persediaan per 1 Januari 2025	15.911.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian Barang Per 31 Desember 2025 (menurut LRA)	7.616.000
Perolehan Lainnya	115.632.964
Total Mutasi Tambah	123.248.964
Mutasi kurang:	
Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2025	121.573.964
Total Mutasi Kurang	121.573.964
Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2025	17.586.000

Mutasi tambah pembelian persediaan senilai Rp123.248.964 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Tambah Persediaan

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1.	Cetakan Buku	1.536	115.632.964
2.	Tipe X	3	18.000
3.	Map L	5	82.500
4.	Business File	2	53.000
5.	Gunting T	10	85.000
6.	Stapler Kenko 10	5	47.500
7.	Kertas HVS	100	5.325.000
8.	Kertas A4	10	475.000
9.	Kertas HVS Biru	2	160.000
10.	Sign Here	10	225.000
11.	Mouse Logitech	5	792.500
12.	Baterai Alkaline AA	5	180.000
13.	Baterai Alkaline AAA	5	172.500
Jumlah		1.698	123.248.964

Selanjutnya, Penjelasan Rincian Mutasi Kurang Barang Konsumsi Rp121.573.964 dijelaskan pada Daftar Persediaan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 26. Daftar Persediaan

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai
1.	Kertas F4 70 gr	35	Rim	1.855.000
2.	Tinta Printer	12	Botol	1.170.000
3.	Cetakan Buku	1.536	Buah	115.632.964
Jumlah Barang Konsumsi		47		121.573.964

Dengan demikian diperoleh angka Beban Barang Konsumsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.586.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Beban Barang Konsumsi per 31 Desember 2025

NO	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1.	Bolpoint Tlz0 0.5	7	182.000
2.	Bolpoint Tlz 1.0 Hitam	4	192.000
3.	Binder Clip No. 105	60	195.000
4.	Paper Clip No.3	2	45.000
5.	Binder Clip No.111	60	300.000
6.	Staples	4	38.000
7.	Isi Staples	5	90.000
8.	Kardus Arsip	1.957	13.699.000
9.	Kertas HVS	50	2.650.000

NO	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
10.	Tinta Epson ORI	2	195.000
Jumlah		2.151	17.586.000

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.348.966.988 dan Rp615.852.587.281. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	8.074.767.932,	22.469.893.777,	(64,06)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.244.810,	24.896.372,	(74,92)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	856.446.000,	1.675.690.000,	(48,89)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	606.792.650,	2.523.968.720,	(75,96)
521211	Beban Bahan	3.444.093.489	113.674.222.065,	(96,97)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	10.438.397.034,	385.084.533.793,	(97,29)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	133.650.000,	17.027.553.880,	(99,22)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,	47.018.699,	(100,00)
522111	Beban Langganan Listrik	907.432.368,	1.580.999.111,	(42,60)
522112	Beban Langganan Telepon	16.606.458,	35.597.268,	(53,35)
522113	Beban Langganan Air	79.892.330,	146.689.451,	(45,54)
522141	Beban Sewa	8.759.726.246,	42.386.340.642,	(79,33)
522151	Beban Jasa Profesi	1.290.000.000,	11.538.353.896,	(88,82)
522191	Beban Jasa Lainnya	1.734.917.671,	17.639.061.779,	(90,16)
Jumlah		36.348.966.988	615.852.587.281,	(94,10)

Selanjutnya. Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 94,1 persen. Hal tersebut disebabkan karena sudah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024, serta adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Barang dan Jasa pada LO sejumlah Rp36.348.966.988 dibandingkan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA sejumlah Rp42.278.905.015 sehingga pada 31 Desember 2025 terdapat selisih sebesar Rp5.929.938.027 yang dijelaskan dengan mutasi beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 29. Mutasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

Mutasi Tambah	
Belanja Barang Operasional	9.578.523.709
Belanja Barang Non Operasional	14.188.946.587
Belanja Langganan dan Jasa	18.511.434.719

Belanja Barang Jasa yang masih harus dibayar	47.110.699
Sewa Dibayar Dimuka TAYL	644.855.110
Total Mutasi Tambah	42.970.870.824
Mutasi Kurang	
Sewa Dibayar Dimuka TAB	413.925.110
Jurnal Balik Tunggakan Akhir 2024	179.964.919
Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	546.000
Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	11.610.000
Pengembalian Belanja Sewa	5.889.636.843
Pengembalian Belanja Jasa Profesi	700.000
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	9.888.000
Jurnal Koreksi Perolehan Lainnya	115.632.964
Jumlah Mutasi Kurang	6.621.903.836
Jumlah Beban Barang dan Jasa (Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	36.348.966.988

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.886.549.684 dan Rp3.534.086.919.

Tabel 30. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.515.786	2.069.062.952	(-76,53)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.401.033.898	1.465.023.967	(-4,37)
JUMLAH		1.886.549.684	3.534.086.919	(46,62)

Pada tahun 2025, terjadi penurunan Beban Pemeliharaan sejumlah 46,62%. Penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan disebabkan karena pembelanjaan pemeliharaan dengan nilai lebih kecil yang tidak dapat dikapitalisasi serta adanya implementasi Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Beban Pemeliharaan pada LO per 31 Desember 2025 dibandingkan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan LRA, yaitu keduanya sebesar Rp1.886.549.684 yang dijelaskan dengan mutasi beban pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 31. Mutasi Beban Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Mutasi Tambah	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.515.786
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.401.033.898
Total Mutasi Tambah	1.886.549.684
Mutasi Kurang	
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta Peralatan-Mesin	0

Total Mutasi Kurang	0
Saldo Beban Per 31 Desember 2025	1.886.549.684

Selanjutnya penjelasan mengenai jumlah pemeliharaan baik pemeliharaan gedung maupun pemeliharaan mesin adalah sebagai berikut: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diatur bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN adalah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin. Seperti yang dapat kita lihat, realisasi belanja pemeliharaan gedung dan peralatan mesin pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nilainya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beban pemeliharaan tidak memenuhi kriteria kapitalisasi karena nilai yang terpecah-pecah di Bawaslu Kabupaten Kota se- Jawa tengah.

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.536.562.343 dan Rp237.936.292.956.

Tabel 32. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.648.858.450,	18.279.678.321,	(58,16)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.465.557.000,	98.596.254.034,	(98,51)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.813.915.891,	74.620.137.014,	(90,87)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.608.231.002,	46.440.223.587,	(66,39)
Jumlah		31.536.562.343	237.936.292.956	(86,75)

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sejumlah 86,75 persen jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Hal tersebut disebabkan karena sudah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024, serta adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Perjalanan Dinas pada LO sejumlah Rp31.536.562.343 dibandingkan jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas pada LRA sejumlah Rp32.642.493.452, yaitu selisih sebesar Rp1.105.931.109. Selisih tersebut diperoleh sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Mutasi Tambah	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.641.658.600,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.474.557.000,
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.043.477.900,
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.482.799.952,
Total Mutasi Tambah	32.642.493.452
Mutasi kurang:	
Jurnal Balik Tunggakan Grobogan	27.555.000

Belanja yang masih harus dibayar 2024	9.000.000
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.439.600,
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.045.227.009,
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.709.500,
Total Mutasi Kurang	1.105.931.109
Saldo Beban per 31 Desember 2025	31.536.562.343

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.433.101.395 dan Rp4.052.461.666. Rincian Beban penyusutan dan amortasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.280.723.631,	3.886.434.276,	10,15
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	138.886.797,	138.886.798,	0,00
592115	Beban Amortisasi Software	13.125.000,	24.798.625,	(47,07)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	365.967,	365.967,	0,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,	1.976.000,	(100,00)
Jumlah		4.433.101.395,00	4.052.461.666,00	9,39

Terdapat selisih antara Beban Pada LO dibandingkan dengan Penyusutan pada Neraca. Penjelasan mengenai selisih tersebut dituangkan ke dalam mutasi nilai Beban Penyusutan. Mutasi nilai beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35. Mutasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025

Mutasi Tambah	
Mutasi Tambah:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025	(29.186.993.512)
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Digunakan 2025	0
Akumulasi Amortisasi 2025	(891.036.809)
Total Mutasi Tambah	(30.078.030.321)
Mutasi kurang:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2024	(29.924.646.304)
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Digunakan 2024	(444.558.905)
Akumulasi Amortisasi 2024	(965.920.842)
Beban Pelepasan Aset	(149.380.000)
Total Mutasi Kurang	(30.890.567.146)
Saldo Beban Per 30 Juni 2025	2.453.761.275

D. 8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.484.623 dan Rp2.156.685.170. Surplus dari kegiatan non operasional merupakan penjumlahan antara Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.976.000 dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp113.786.020 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- 1. Penjelasan mengenai Beban Pelepasan Aset Rp184.270.140 merupakan Beban Pelepasan Aset yang timbul akibat adanya Pencatatan Barang yang Dihapuskan pada tahun 2025 sebesar Rp184.270.140.
- 2. Penjelasan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 255.754.763, merupakan pendapatan yang bersumber dari pengembalian belanja yang bersumber dari:
 - a) Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp11.828.502;
 - b) Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp243.026.560;
 - c) Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp899.701.

Selanjutnya, perbandingan surplus kegiatan non operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Surplus Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Surplus Kegiatan Non Operasional	71.484.623	2.156.685.170	96,69
Jumlah	71.484.623	2.156.685.170	96,69

D. 9 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D. 10 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp149.656.316.560 dan minus Rp907.413.223.923. Defisit LO mengalami penurunan sebesar 83,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Presentase kenaikan surplus pada LO sebagai berikut:

Tabel 37. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan	3.005.038,	63.490.299	(95,27)
Beban	149.730.806.221,	909.633.399.392,	(83,54)

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Defisit dari kegiatan Operasional	(149.727.801.183,)	(909.569.909.093,)	(83,54)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	71.484.623,	2.156.685.170,	(96,69)
Defisit-LO	(149.656.316.560,)	(907.413.223.923,)	(83,5)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp147.977.746.320 dan Rp221.173.717.477.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp149.662.950.544 dan Rp907.413.223.923. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Terdapat penurunan defisit LO sebesar Rp757.750.273.379 atau sebesar 83,51%.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar minus Rp83.453.573.138 dan Rp0. Koreksi sebesar Rp83.453.573.138 merupakan pengesahan pengembalian Hibah Langsung Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Bawaslu Kabupaten/Kota	Pengembalian
1	KAB. BANJARNEGARA	730.359.322
2	KAB. BANYUMAS	2.859.986.580
3	KAB. BATANG	19.358.937
4	KAB. BLORA	1.349.356.787
5	KAB. BOYOLALI	56.640.617
6	KAB. BREBES	2.045.965.178
7	KAB. CILACAP	710.417.501
8	KAB. DEMAK	1.028.032.196
9	KAB. GROBOGAN	856.911.997
10	KAB. JEPARA	46.082.532
11	KAB. KARANGANYAR	120.866.423
12	KAB. KEBUMEN	829.396.691
13	KAB. KENDAL	1.696.288.243
14	KAB. KLATEN	1.832.461.564
15	KAB. KUDUS	620.142.805
16	KAB. MAGELANG	1.060.906.697
17	KAB. PATI	471.416.394
18	KAB. PEKALONGAN	1.348.824.656
19	KAB. PEMALANG	1.575.338.700
20	KAB. PURBALINGGA	702.018.393
21	KAB. PURWOREJO	887.005.900
22	KAB. REMBANG	101.187.760
23	KAB. SEMARANG	3.318.856.859
24	KAB. SRAGEN	1.058.322.258
25	KAB. SUKOHARJO	1.188.376.849
26	KAB. TEGAL	685.085.460
27	KAB. TEMANGGUNG	1.046.400.264
28	KAB. WONOGIRI	1.596.533.708

No.	Bawaslu Kabupaten/Kota	Pengembalian
29	KAB. WONOSOBO	1.118.994.788
30	KOTA MAGELANG	585.047.147
31	KOTA PEKALONGAN	175.880.005
32	KOTA SALATIGA	668.643.349
33	KOTA SEMARANG	1.958.087.490
34	KOTA SURAKARTA	1.104.892.421
35	KOTA TEGAL	1.201.746.256
36	PROVINSI JAWA TENGAH	46.797.740.411
	TOTAL	83.453.573.138

E.3.2 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.131.146.951 dan Rp834.317.586.283. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda, baik internal KL antar KL antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Tabel 38. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik (Turun)
Ditagihkan ke Entitas Lain	103.599.295.108	496.190.234.138	(79,12)
Diterima dari Entitas Lain	(307.974.692)	(764.472.855)	(59,71)
Transfer Keluar	(1.318.662.495)	0	(100,00)
Transfer Masuk	12.468.125	182.285.000	(93,16)
Pengesahan Hibah Langsung	150.000.000	338.709.540.000	(99,96)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(3.979.095)	0	(100,00)
Jumlah	102.131.146.951	834.317.586.283	(87,76)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp103.599.295.108 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel 39. Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Akun	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	51	Belanja Pegawai	75.488.819.990
2.	52	Belanja Barang	28.156.622.218
3.	53	Belanja Modal	0
		Jumlah	103.599.295.108

2. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp307.974.692 merupakan pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Transaksi Antar Entitas tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 40. Diterima dari Entitas Lain

Uraian	2025	2024
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.038	11.870.299
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.828.502	350.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	243.026.560	637.917.330
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	50.114.592	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.000.000	51.620.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	62.715.226
Jumlah DDEL	307.974.692	764.472.855

E.3 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar minus Rp130.966.508.566 dan Rp73.195.971.157. Selanjutnya rincian kenaikan/penurunan pada ekuitas disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Defisit LO	(149.662.950.544)	(907.413.223.923,)	(83,51)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	18.868.145	(100.333.517,)	(118,81)
Koreksi Lain-lain	(83.453.573.138)	0	0,
Transaksi Antar Entitas	102.131.146.951	834.317.586.283,	(87,76)
Jumlah Kenaikan / Penurunan Ekuitas	(130.966.508.566)	(73.195.971.157,)	78,92

Kesimpulan dari tabel di atas adalah pada 31 Desember 2025 terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp 130.966.508.566 sehingga ekuitas akhir pada 31 Desember 2025 senilai Rp17.011.237.754.

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.011.237.754 dan Rp147.977.746.320. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp147.977.746.320 dan penurunan ekuitas sebesar

Rp130.966.508.606. Perbandingan ekuitas akhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Ekuitas Akhir

Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Ekuitas Akhir	17.011.237.754	147.977.746.320	(88,5)
Jumlah Ekuitas Akhir	17.011.237.754	147.977.746.320	(88,5)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan. Tugas. Fungsi. Wewenang. Organisasi. dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan Suara.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2273.1/KU.01.00/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sehingga terdapat susunan SOTK Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 43. Semula Data Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Plt. Kepala Sekretariat	
2	Nurdiansyah, S.Kom., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Pengawasan Pemilu
3	Sadhu Sudiarto S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Kepala Bagian Administrasi	Administrasi
5	Bayu Indra Permana S.H. M.H.	Kepala Bagian Hukum Humas Data dan Informasi / Analis Hukum Ahli Muda	Hukum Humas Data dan Informasi / Fungsional
6	Inti Priswari S.IP. M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Fungsional
7	Guritno Ari Wibowo S.Si. M.Pd	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Fungsional
8	Muhammad Syaiful Mujib S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Fungsional
9	Novi Wulandari, S.Ak.	Analis Pengelola Keuangan APBN	Fungsional
10	Nova Dwi Kristiana, S.M.	Pranata Keuangan APBN	Fungsional

Tabel 44. Menjadi Data Pejabat Struktural dan Fungsional 31 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat	
2	Nurdiansyah, S.Kom., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Pengawasan Pemilu
3	Sadhu Sudiarto S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Kepala Bagian Administrasi	Administrasi
5	Bayu Indra Permana S.H. M.H.	Kepala Bagian Hukum Humas Data dan Informasi / Analis Hukum Ahli Muda	Hukum Humas Data dan Informasi / Fungsional
6	Inti Priswari S.IP. M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Fungsional
7	Guritno Ari Wibowo S.Si. M.Pd	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Fungsional
8	Muhammad Syaiful Mujib S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Fungsional
9	Novi Wulandari, S.Ak.	Analis Pengelola Keuangan APBN	Fungsional
10	Nova Dwi Kristiana, S.M.	Pranata Keuangan APBN	Fungsional

F.2 Pengungkapan Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2273.1/KU.01.00/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. maka selain dari pada perubahan susunan SOTK di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, susunan pengelola keuangan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juga mengalami perubahan dengan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 45. Semula Data Pengelola Keuangan

No	Nama	Jabatan
1	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	KPA
2	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	PPK
3	Sriyadi	BP
4	Nova Dwi Kristiana	BPP
5	Novi Wulandari S.Ak.	PPSPM
6	Nurma Anggi Pramesti S.Tr.Ak.	Petugas SAI
7	Latief Yulianto A.Md.	Petugas SAI
8	Pramudya Kusuma Adjie,A.Md,Ak	Petugas SAI
9	Irawan Agung Laksono,Amd Ak	Petugas SAI

Tabel 46. Menjadi Data Pengelola Keuangan

No	Nama	Jabatan
1	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	KPA
2	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	PPK
3	Nova Dwi Kristiana	BP
4	Novi Wulandari S.Ak.	PPSPM
5	Nurma Anggi Pramesti S.Tr.Ak.	Petugas SAI
6	Latief Yulianto A.Md.	Petugas SAI
7	Pramudya Kusuma Adjie,A.Md,Ak	Petugas SAI
8	Irawan Agung Laksono,Amd Ak	Petugas SAI

Daftar anggota staf pengelola keuangan pembantu kuasa pengguna anggaran di lingkungan sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa tengah tahun anggaran 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 47. Daftar Pengelola Keuangan Pembantu KPA

No	Nama	Jabatan
1	Ari Dwi Saputra S.Pd.	Staf Pengelola Keuangan
2	Suciyati	Staf Pengelola Keuangan
3	Aniatus Solekhah A.Md	Staf Pengelola Keuangan

Selanjutnya, daftar staf pengelola keuangan pembantu PPK pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 48. Menjadi Daftar Pengelola Keuangan Pembantu PPK

No	Nama	Jabatan
1	Husnul Faizah,A.Md	Staf Pengelola Keuangan
2	Arista Yoga Feriadi SE	Staf Pengelola Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

No	Nama	Jabatan	Kabupaten/Kota
1	Akhmad Pujiono	Pejabat Pembuat Komitmen	Banjarnegara
2	Samsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Banjarnegara
3	Eni Nurviatun	Pejabat Pembuat Komitmen	Banyumas
4	Joko Purnomo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Banyumas
5	Lutfiyah, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Batang
6	Muhammad Sofan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Batang
7	Ahmad Subhanul Anwar	Pejabat Pembuat Komitmen	Blora
8	Nikmah Diana Widara Santi, SE.,MM	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Blora
9	Agus Suyanto	Pejabat Pembuat Komitmen	Boyolali
10	Susi Prehartanti Nugroho, ST	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Boyolali
11	Heri Berta Maria Indira Dewidjani	Pejabat Pembuat Komitmen	Brebes
12	Yeni Susanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Brebes
13	Chandra Hartanto, S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen	Cilacap
14	Eti Purwanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Cilacap
15	Yanto Mulyanto, S.Sos,MM	Pejabat Pembuat Komitmen	Demak
16	Danan Danu Admaji	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Demak
17	Edy Purwanto	Pejabat Pembuat Komitmen	Grobogan
18	Sudarsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Grobogan
19	Abdul Ghofur, S.IP., MH	Pejabat Pembuat Komitmen	Jepara
20	Irma Novel Sari, ST, MT	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Jepara
21	Harli Krisnawa Adi	Pejabat Pembuat Komitmen	Karanganyar
22	Wiranti, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Karanganyar
23	Suprayogi, S.E	Pejabat Pembuat Komitmen	Kebumen
24	Jati Wahyuni	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kebumen
25	Andika Asykar, S.IP	Pejabat Pembuat Komitmen	Kendal
26	Oktia Dwi Ina Aini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kendal
27	Suwanto, S.IP	Pejabat Pembuat Komitmen	Klaten
28	Anik Tri Pujiastutik, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Klaten
29	Sri Suwanti	Pejabat Pembuat Komitmen	Kudus
30	Moch Sofiah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kudus
31	Fatach Yasin	Pejabat Pembuat Komitmen	Magelang
32	Wahyu Styorini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Magelang
33	RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Pati
34	Roni Sistiawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pati
35	Toto Suprianto	Pejabat Pembuat Komitmen	Pekalongan
36	Mustajirin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pekalongan
37	Edy Siswanto, S.H	Pejabat Pembuat Komitmen	Pemalang
38	Arya Anggara Pranadhita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pemalang
39	Andrias Widhi Cahyadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Purbalingga
40	Ikhwan Isnanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Purbalingga
41	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Pejabat Pembuat Komitmen	Purworejo
42	Mashuri Nur Hidayat, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Purworejo
43	Ratna Widiyanti, S.M	Pejabat Pembuat Komitmen	Rembang
44	Purnomo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rembang
45	Marjiono, S.H	Pejabat Pembuat Komitmen	Semarang
46	Rika Ayu Lestari	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Semarang
47	Yuni Setyawati, SH.,M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Sragen
48	Baharuddin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sragen
49	Ali Mursidi, S.Sos, M.M	Pejabat Pembuat Komitmen	Sukoharjo

50	Danu Pradana, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sukoharjo
51	Surya Ratmono, S.IP	Pejabat Pembuat Komitmen	Tegal
52	Husnul Faizah, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Tegal
53	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd	Pejabat Pembuat Komitmen	Temanggung
54	Dwijayanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Temanggung
55	Maryati	Pejabat Pembuat Komitmen	Wonogiri
56	Dhimas Jati Prabawa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wonogiri
57	Fresti Setyoko	Pejabat Pembuat Komitmen	Wonosobo
58	Borimin, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wonosobo
59	Agus Suhartono, S.E., M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Magelang
60	Elisabet Siwi Trisetyoningsih, S.ST.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Magelang
61	Sopan Wijianto	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Pekalongan
62	Redemptus Shyantica Anobey	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Pekalongan
63	Daryanto, S.E	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Salatiga
64	Muh. Akhlis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Salatiga
65	Sutoto Rahmat, S.E,MM	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Semarang
66	Dian Indah Sulistyaningrum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Semarang
67	Rafi Ulludin Himam, A.Md	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Surakarta
68	Muhammad Barokah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Surakarta
69	Yoni Ediyanto	Pejabat Pembuat Komitmen	Kota Tegal
70	Satibi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kota Tegal

F.3 Pengungkapan Realisasi Kinerja

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Rincian Pagu Anggaran Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Realisasi Kinerja

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	5245	BIC002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	Lembaga	1	100	100	53,06	Non PN	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terlaksana 100 %
2	5245	BIC003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1	Lembaga	1	100	100	44,94	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Banjarnegara sudah terlaksana 100 %
3	5245	BIC004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1	Lembaga	1	100	100	62,22	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Banyumas sudah terlaksana 100 %

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
4	5245	BIC005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1	Lembaga	1	100	100	1,83	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Batang sudah terlaksana 100 %
5	5245	BIC006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	1	Lembaga	1	100	100	19,36	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Blora sudah terlaksana 100 %
6	5245	BIC007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	1	Lembaga	1	100	100	5,12	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Boyolali sudah terlaksana 100 %
7	5245	BIC008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	1	Lembaga	1	100	100	38,33	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Brebes sudah terlaksana 100 %
8	5245	BIC009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	1	Lembaga	1	100	100	13,61	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Cilacap sudah terlaksana 100 %

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
9	5245	BIC010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	1	Lembaga	1	100	100	36,48	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Demak sudah terlaksana 100 %
10	5245	BIC011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	1	Lembaga	1	100	100	2,43	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Grobogan sudah terlaksana 100 %
11	5245	BIC012	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10	1	Lembaga	1	100	100	5,23	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Jepara sudah terlaksana 100 %
12	5245	BIC013	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11	1	Lembaga	1	100	100	1,39	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana 100 %
13	5245	BIC014	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 12	1	Lembaga	1	100	100	12,67	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Kebumen sudah terlaksana 100 %
14	5245	BIC015	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 13	1	Lembaga	1	100	100	7,42	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Kendal sudah terlaksana 100 %
15	5245	BIC016	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 14	1	Lembaga	1	100	100	19,74	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Klaten sudah terlaksana 100 %

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
16	5245	BIC017	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 15	1	Lembaga	1	100	100	15,28	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Kudus sudah terlaksana 100 %
17	5245	BIC018	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 16	1	Lembaga	1	100	100	11,12	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Magelang sudah terlaksana 100 %
18	5245	BIC019	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 17	1	Lembaga	1	100	100	28,89	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Pati sudah terlaksana 100 %
19	5245	BIC020	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 18	1	Lembaga	1	100	100	37,46	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Pekalongan sudah terlaksana 100 %
20	5245	BIC021	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 19	1	Lembaga	1	100	100	43,04	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang sudah terlaksana 100 %
21	5245	BIC022	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 20	1	Lembaga	1	100	100	13,43	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Purbalingga sudah terlaksana 100 %
22	5245	BIC023	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 21	1	Lembaga	1	100	100	7,39	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Purworejo sudah terlaksana 100 %
23	5245	BIC024	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 22	1	Lembaga	1	100	100	7,87	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Rembang sudah terlaksana 100 %

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
24	5245	BIC025	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 23	1	Lembaga	1	100	100	50,18	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Semarang sudah terlaksana 100 %
25	5245	BIC026	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 24	1	Lembaga	1	100	100	21,16	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Sragen sudah terlaksana 100 %
26	5245	BIC027	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 25	1	Lembaga	1	100	100	18,76	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Sukoharjo sudah terlaksana 100 %
27	5245	BIC028	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 26	1	Lembaga	1	100	100	26,08	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Tegal sudah terlaksana 100 %
28	5245	BIC029	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 27	1	Lembaga	1	100	100	14,75	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Temanggung sudah terlaksana 100 %
29	5245	BIC030	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 28	1	Lembaga	1	100	100	7,28	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana 100 %
30	5245	BIC031	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 29	1	Lembaga	1	100	100	37,58	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Wonosobo sudah terlaksana 100 %
31	5245	BIC032	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 30	1	Lembaga	1	100	100	3,24	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Magelang sudah terlaksana 100 %
32	5245	BIC033	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 31	1	Lembaga	1	100	100	2,6	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Pekalongan sudah terlaksana 100 %

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)					GAP**	PN	Keterangan
				Target	Satuan	S.d Bulan Juni					
						RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
33	5245	BIC034	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 32	1	Lembaga	1	100	100	40,42	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Salatiga sudah terlaksana 100 %
34	5245	BIC035	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 33	1	Lembaga	1	100	100	36,85	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Semarang sudah terlaksana 100 %
35	5245	BIC036	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 34	1	Lembaga	1	100	100	29,23	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Surakarta sudah terlaksana 100 %
36	5245	BIC037	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 35	1	Lembaga	1	100	100	42,78	Non PN	Pengawasan Pilkada Serentak Kota Tegal sudah terlaksana 100 %
37	6849	EBA994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	56,98	62,64	0	Non PN	Prosentase Layanan Perkantoran bulan Juni sebesar 12,77 %

F.4 Pengungkapan Lain-lain

1. Penggunaan Aplikasi SAKTI

Di awal tahun 2022 terdapat perubahan aplikasi yang digunakan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang sebelumnya menggunakan aplikasi SAS SAIBA SIMAK- BMN dan saat ini seluruh aplikasi tersebut sudah terintegrasi menjadi aplikasi SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai proses penganggaran pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Berikut daftar pengguna aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Tabel 50. Semula User Pejabat Operator dan Administrator Aplikasi SAKTI

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan	Kategori User
1	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	KPA	Approval
2	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	PPK	Validator
3	Novi Wulandari S.Ak	PPSPM	Approval
4	Sriyadi	Bendahara Pengeluaran	Pembayaran
5	Nurma Anggi Pramesti S.Tr.Ak.	Staf SAI	Operator Anggaran

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan	Kategori User
6	Latief Yulianto A.Md.	Staf SAI	Operator Aset
7	Husnul Faizah A.Md.	Staf SAI	Operator GLP

Tabel 51. Menjadi User Pejabat Operator dan Administrator Aplikasi SAKTI

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan	Kategori User
1	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	KPA	Approval
2	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev	PPK	Validator
3	Novi Wulandari S.Ak	PPSPM	Approval
4	Sriyadi	Bendahara Pengeluaran	Pembayaran
5	Nurma Anggi Pramesti S.Tr.Ak.	Staf SAI	Operator Anggaran
6	Latief Yulianto A.Md.	Staf SAI	Operator Aset
7	Husnul Faizah A.Md.	Staf SAI	Operator GLP

2. Rekening Pemerintah APBN

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan migrasi rekening ke *virtual account* pada 31 Maret 2021. selanjutnya data rekening per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 36 rekening. yang terdiri dari 1 (satu) rekening Bendahara Pengeluaran di Bawaslu Provinsi dan 35 rekening penampungan anggaran APBN Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan menggunakan Bank BRI dan Cabang A.Yani Semarang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Data Rekening Virtual Account

No.	Nomor Rekening	Nama
1	652296863281000	Bpg 026 Bawaslu Prov. Jateng
2	652296863281001	Bpp 026 Panwas Kab Banjarnegara
3	652296863281002	Bpp 026 Panwas Kab Banyumas
4	652296863281003	Bpp 026 Panwas Kab Batang
5	652496863281004	Bpp 026 Panwas Kab Blora
6	652296863281005	Bpp 026 Panwas Kab Boyolali
7	652296863281006	Bpp 026 Panwas Kab Brebes
8	652296863281007	Bpp 026 Panwas Kab Cilacap
9	652296863281008	Bpp 026 Panwas Kab Demak
10	652296863281009	Bpp 026 Panwas Kab Grobogan
11	652296863281010	Bpp 026 Panwas Kab Jepara
12	652296863281011	Bpp 026 Panwas Kab Karanganyar

No.	Nomor Rekening	Nama
13	652496863281012	Bpp 026 Panwas Kab Kebumen
14	652296863281013	Bpp 026 Panwas Kab Kendal
15	652296863281014	Bpp 026 Panwas Kab Klaten
16	652296863281015	Bpp 026 Panwas Kab Kudus
17	652296863281016	Bpp 026 Panwas Kab Magelang
18	652296863281017	Bpp 026 Panwas Kab Pati
19	652296863281018	Bpp 026 Panwas Kab Pekalongan
20	652296863281019	Bpp 026 Panwas Kab Pemalang
21	652496863281020	Bpp 026 Panwas Kab Purbalingga
22	652296863281021	Bpp 026 Panwas Kab Purworejo
23	652296863281022	Bpp 026 Panwas Kab Rembang
24	652296863281023	Bpp 026 Panwas Kab Semarang
25	652296863281024	Bpp 026 Panwas Kab Sragen
26	652296863281025	Bpp 026 Panwas Kab Sukoharjo
27	652296863281026	Bpp 026 Panwas Kab Tegal
28	652296863281027	Bpp 026 Panwas Kab Temanggung
29	652296863281028	Bpp 026 Panwas Kab Wonogiri
30	652296863281029	Bpp 026 Panwas Kab Wonosobo
31	652296863281030	Bpp 026 Panwas Kota Magelang
32	652296863281031	Bpp 026 Panwas Kota Pekalongan
33	652296863281032	Bpp 026 Panwas Kota Salatiga
34	652296863281033	Bpp 026 Panwas Kota Semarang
35	652296863281034	Bpp 026 Panwas Kota Surakarta
36	652296863281035	Bpp 026 Panwas Kota Tegal

3. Data Rekening Hibah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pembukaan rekening baik tingkat provinsi maupun Kabupaten kota dengan data sebagai berikut:

A. Rekap Rekening PDHL

Tabel 53. Rekap Rekening PDHL

NO	Satuan Kerja			Virtual Rekening	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
Rekening Lainnya (Penampungan Dana Hibah)						
1	115	01	686328	5001206863282401	PROVINSI JAWA TENGAH	RPL026 PDHL PIGUB JTG 2RUC51XA
2	115	01	686328	5001206863282402	KAB. BANJARNEGARA	RPL026 PDHL PIBUP BNE 2Z6Z6XMA
3	115	01	686328	5001206863282403	KAB. BANYUMAS	RPL026 PDHL PIBUP BYM 2FH167JA
4	115	01	686328	5001206863282404	KAB. BATANG	RPL026 PDHL PIBUP BTG 2CNYXEPA

NO	Satuan Kerja			Virtual Rekening	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
5	115	01	686328	5001206863282405	KAB. BLORA	RPL026 PDHL PIBUP BLR 24RMB9VA
6	115	01	686328	5001206863282406	KAB. BOYOLALI	RPL026 PDHL PIBUP BYL 2DKRC59A
7	115	01	686328	5001206863282407	KAB. BREBES	RPL026 PDHL PIBUP BRE 2PFCE2BA
8	115	01	686328	5001206863282408	KAB. CILACAP	RPL026 PDHL PIBUP CLC 25T811QA
9	115	01	686328	5001206863282409	KAB. DEMAK	RPL026 PDHL PIBUP DMK 2Q1RPMWA
10	115	01	686328	5001206863282410	KAB. GROBOGAN	RPL026 PDHL PIBUP GRB 22DL9UTA
11	115	01	686328	5001206863282411	KAB. JEPARA	RPL026 PDHL PIBUP JPR 21MDPVGA
12	115	01	686328	5001206863282412	KAB. KARANGANYAR	RPL026 PDHL PIBUP KRY 2A6DA38A
13	115	01	686328	5001206863282413	KAB. KEBUMEN	RPL026 PDHL PIBUP KBM 26L2JR3A
14	115	01	686328	654256863282401	KAB. KENDAL	RPL026 PDHL PIBUP KENDAL
15	115	01	686328	5001206863282414	KAB. KLATEN	RPL026 PDHL PIBUP KLT 2QGDX31A
16	115	01	686328	5001206863282415	KAB. KUDUS	RPL026 PDHL PIBUP KDS 29UBJNHA
17	115	01	686328	5001206863282416	KAB. MAGELANG	RPL026 PDHL PIBUP MGL 2SAQR6RA
18	115	01	686328	5001206863282417	KAB. PATI	RPL026 PDHL PIBUP KAB PATI
19	115	01	686328	5001206863282418	KAB. PEKALONGAN	RPL026 PDHL PIBUP PKL 2W4XSWXA
20	115	01	686328	654256863282402	KAB. PEMALANG	RPL026 PDHL PIBUP PEMALANG
21	115	01	686328	5001206863282419	KAB. PURBALINGGA	RPL026 PDHL PIBUP PBL 2US6TL8A
22	115	01	686328	5001206863282420	KAB. PURWOREJO	RPL026 PDHL PIBUP PWJ 2BK3B5GA
23	115	01	686328	5001206863282421	KAB. REMBANG	RPL026 PDHL PIBUP RBG 29TCV3MA
24	115	01	686328	5001206863282422	KAB. SEMARANG	RPL026 PDHL PIBUP SMR 2K3EDGFA
25	115	01	686328	5001206863282423	KAB. SRAGEN	RPL026 PDHL PIBUP SRG 2QJ7J8MA
26	115	01	686328	5001206863282424	KAB. SUKOHARJO	RPL026 PDHL PIBUP SKH 225FYZ9A
27	115	01	686328	5001206863282425	KAB. TEGAL	RPL026 PDHL PIBUP TGL 28ZCNTDA
28	115	01	686328	5001206863282426	KAB. TEMANGGUNG	RPL026 PDHL PIBUP TMG 2ZX7SC8A
29	115	01	686328	5001206863282427	KAB. WONOGIRI	RPL026 PDHL PIBUP WGR 2LRG92BA
30	115	01	686328	5001206863282428	KAB. WONOSOBO	RPL026 PDHL PIBUP WSB 287M76JA
31	115	01	686328	5001206863282429	KOTA MAGELANG	RPL026 PDHL PIKOT MGL 2UG5MTUA
32	115	01	686328	5001206863282430	KOTA PEKALONGAN	RPL026 PDHL PIKOT PKL 2YMGY6XA
33	115	01	686328	5001206863282431	KOTA SALATIGA	RPL026 PDHL PIKOT SLT 2K8AGFNA
34	115	01	686328	5001206863282432	KOTA SEMARANG	RPL026 PDHL PIKOT SMR 2LHYJJXA
35	115	01	686328	5001206863282433	KOTA SURAKARTA	RPL026 PDHL PIKOT SRK 2R1TTTGA
36	115	01	686328	5001206863282434	KOTA TEGAL	RPL026 PDHL PIKOT TGL 229KGWQA

B. Rekap Rekening PDH Pilgub

Tabel 54. Rekap Rekening PDH Pilgub

NO	Satuan Kerja			Rekening Lainnya	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
Rekening Lainnya (Penyaluran Dana Hibah Pilgub)						

NO	Satuan Kerja			Rekening Lainnya	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
		01	686328	5001106863181569	PROVINSI JAWA TENGAH	RPL026 PDH PIGUB JATG 2RUC51XA
1	115	01	686328	5001106863282501	KAB. BANJARNEGARA	RPL026 PDH PIGUB BANE 2RUC51XA
2	115	01	686328	5001106863282502	KAB. BANYUMAS	RPL026 PDH PIGUB BNYM 2RUC51XA
3	115	01	686328	5001106863282503	KAB. BATANG	RPL026 PDH PIGUB BTNG 2RUC51XA
4	115	01	686328	5001106863282504	KAB. BLORA	RPL026 PDH PIGUB BLOR 2RUC51XA
5	115	01	686328	5001106863282505	KAB. BOYOLALI	RPL026 PDH PIGUB BYLL 2RUC51XA
6	115	01	686328	5001106863282506	KAB. BREBES	RPL026 PDH PIGUB KAB BREBES2RUC51XA
7	115	01	686328	5001106863282507	KAB. CILACAP	RPL026 PDH PIGUB CLCP 2RUC51XA
8	115	01	686328	5001106863282508	KAB. DEMAK	RPL026 PDH PIGUB DMAK 2RUC51XA
9	115	01	686328	5001106863282509	KAB. GROBOGAN	RPL026 PDH PIGUB GRBK 2RUC51XA
10	115	01	686328	5001106863282510	KAB. JEPARA	RPL026 PDH PIGUB JEP A 2RUC51XA
11	115	01	686328	5001106863282511	KAB. KARANGANYAR	RPL026 PDH PIGUB KRNY 2RUC51XA
12	115	01	686328	5001106863282512	KAB. KEBUMEN	RPL026 PDH PIGUB KEBM 2RUC51XA
13	115	01	686328	5001106863282513	KAB. KENDAL	RPL026 PDH PIGUB KEND 2RUC51XA
14	115	01	686328	5001106863282514	KAB. KLATEN	RPL026 PDH PIGUB KLTN 2RUC51XA
15	115	01	686328	5001106863282515	KAB. KUDUS	RPL026 PDH PIGUB KDUS 2RUC51XA
16	115	01	686328	5001106863282516	KAB. MAGELANG	RPL026 PDH PIGUB MAGL 2RUC51XA
17	115	01	686328	5001106863282517	KAB. PATI	RPL026 PDH PIGUB PATI 2RUC51XA
18	115	01	686328	5001106863282518	KAB. PEKALONGAN	RPL026 PDH PIGUB PKLG 2RUC51XA
19	115	01	686328	5001106863282519	KAB. PEMALANG	RPL026 PDH PIGUB PMLG 2RUC51XA
20	115	01	686328	5001106863282520	KAB. PURBALINGGA	RPL026 PDH PIGUB PURB 2RUC51XA
21	115	01	686328	5001106863282521	KAB. PURWOREJO	RPL026 PDH PIGUB PWRJ 2RUC51XA
22	115	01	686328	5001106863282522	KAB. REMBANG	RPL026 PDH PIGUB RMBG 2RUC51XA
23	115	01	686328	5001106863282523	KAB. SEMARANG	RPL026 PDH PIGUB SMRG 2RUC51XA
24	115	01	686328	5001106863282524	KAB. SRAGEN	RPL026 PDH PIGUB SRGN 2RUC51XA
25	115	01	686328	5001106863282525	KAB. SUKOHARJO	RPL026 PDH PIGUB SKHJ 2RUC51XA
26	115	01	686328	5001106863282526	KAB. TEGAL	RPL026 PDH PIGUB TEGL 2RUC51XA
27	115	01	686328	5001106863282527	KAB. TEMANGGUNG	RPL026 PDH PIGUB TEMG 2RUC51XA
28	115	01	686328	5001106863282528	KAB. WONOGIRI	RPL026 PDH PIGUB WNGR 2RUC51XA
29	115	01	686328	5001106863282529	KAB. WONOSOBO	RPL026 PDH PIGUB WNSB 2RUC51XA
30	115	01	686328	5001106863282530	KOTA MAGELANG	RPL026 PDH PIGUB MGLG 2RUC51XA
31	115	01	686328	5001106863282531	KOTA PEKALONGAN	RPL026 PDH PIGUB PKLG 2RUC51XA
32	115	01	686328	5001106863282532	KOTA SALATIGA	RPL026 PDH PIGUB SLTG 2RUC51XA

NO	Satuan Kerja			Rekening Lainnya	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
33	115	01	686328	5001106863282533	KOTA SEMARANG	RPL026 PDH PIGUB SMRG 2RUC51XA
34	115	01	686328	5001106863282534	KOTA SURAKARTA	RPL026 PDH PIGUB SRKT 2RUC51XA
35	115	01	686328	5001106863282535	KOTA TEGAL	RPL026 PDH PIGUB TEGL 2RUC51XA

C. Rekap Rekening PDH Pilbup

Tabel 55. Rekap Rekening PDH Pilbup

NO	Satuan Kerja			Rekening Lainnya	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
Rekening Lainnya (Penyaluran Dana Hibah Pilgub/Pilbup/Pilwalkot)						
1	115	01	686328	5001106863282536	KAB. BANJARNEGARA	RPL026 PDH PIBUP BANE 2Z6Z6XMA
2	115	01	686328	5001106863282537	KAB. BANYUMAS	RPL026 PDH PIBUP BYMS 2FH167JA
3	115	01	686328	5001106863282538	KAB. BATANG	RPL026 PDH PIBUP BTNG 2CNYXEPA
4	115	01	686328	5001106863282539	KAB. BLORA	RPL026 PDH PIBUP BLR 24RMB9VA
5	115	01	686328	5001106863282540	KAB. BOYOLALI	RPL026 PDH PIBUP BYLL 2DKRC59A
6	115	01	686328	5001106863282541	KAB. BREBES	RPL026 PDH PIBUP BRE 2PFCE2BA
7	115	01	686328	5001106863282542	KAB. CILACAP	RPL026 PDH PIBUP CLC 25T811QA
8	115	01	686328	5001106863282543	KAB. DEMAK	RPL026 PDH PIBUP DMK 2Q1RPMWA
9	115	01	686328	5001106863282544	KAB. GROBOGAN	RPL026 PDH PIBUP GRB 22DL9UTA
10	115	01	686328	5001106863282545	KAB. JEPARA	RPL026 PDH PIBUP JPR 21MDPVGA
11	115	01	686328	5001106863282546	KAB. KARANGANYAR	RPL026 PDH PIBUP KRY 2A6DA38A
12	115	01	686328	5001106863282547	KAB. KEBUMEN	RPL026 PDH PIBUP KBM 26L2JR3A
13	115	01	686328	654266863282501	KAB. KENDAL	RPL026 PDH PILBUP KENDAL
14	115	01	686328	5001106863282548	KAB. KLATEN	RPL026 PDH PIBUP KLT 2QGDX31A
15	115	01	686328	5001106863282549	KAB. KUDUS	RPL026 PDH PIBUP KDS 29UBJNHA
16	115	01	686328	5001106863282550	KAB. MAGELANG	RPL026 PDH PIBUP MGL 2SAQR6RA
17	115	01	686328	5001106863282551	KAB. PATI	RPL026 PDH PILBUP KAB PATI
18	115	01	686328	5001106863282552	KAB. PEKALONGAN	RPL026 PDH PIBUP PKL 2W4XSWXA
19	115	01	686328	654266863282502	KAB. PEMALANG	RPL026 PDH PILBUP PEMALANG
20	115	01	686328	5001106863282553	KAB. PURBALINGGA	RPL026 PDH PIBUP PWJ 2BK3B5GA
21	115	01	686328	5001106863282554	KAB. PURWOREJO	RPL026 PDH PIBUP PBL 2US6TL8A
22	115	01	686328	5001106863282555	KAB. REMBANG	RPL026 PDH PIBUP PWJ 2BK3B5GA
23	115	01	686328	5001106863282556	KAB. SEMARANG	RPL026 PDH PIBUP SMR 2K3EDGFA
24	115	01	686328	5001106863282557	KAB. SRAGEN	RPL026 PDH PIBUP SRG 2QJ7J8MA
25	115	01	686328	5001106863282558	KAB. SUKOHARJO	RPL026 PDH PIBUP SKH 225FYZ9A

NO	Satuan Kerja			Rekening Lainnya	Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten Kota	Revisi
	BA	Es. I	Kode	Nomor		Nama Rekening
26	115	01	686328	5001106863282559	KAB. TEGAL	RPL026 PDH PIBUP TGL 28ZCNTDA
27	115	01	686328	5001106863282560	KAB. TEMANGGUNG	RPL026 PDH PIBUP TMG 2ZX7SC8A
28	115	01	686328	5001106863282561	KAB. WONOGIRI	RPL026 PDH PIBUP WGR 2LRG92BA
29	115	01	686328	5001106863282562	KAB. WONOSOBO	RPL026 PDH PIBUP WSB 287M76JA
30	115	01	686328	5001106863282563	KOTA MAGELANG	RPL026 PDH PIKOT MGL 2UG5MTUA
31	115	01	686328	5001106863282564	KOTA PEKALONGAN	RPL026 PDH PIKOT PKL 2YMGY6XA
32	115	01	686328	5001106863282565	KOTA SALATIGA	RPL026 PDH PIKOT SLT 2K8AGFNA
33	115	01	686328	5001106863282566	KOTA SEMARANG	RPL026 PDH PIKOT SMR 2LHYJJXA
34	115	01	686328	5001106863282567	KOTA SURAKARTA	RPL026 PDH PIKOT SRK 2R1TTTGA
35	115	01	686328	5001106863282568	KOTA TEGAL	RPL026 PDH PIKOT TGL 229KGWQA

4. Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat/APIP

Berdasarkan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK dan BPKP Pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2023. Terdapat catatan hal sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2009
 - 1) Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan pada Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara tidak tertib dan tidak sesuai ketentuan pada Panwaslu Kabupaten Wonogiri sebesar Rp76.053.153 Sampai dengan Akhir Desember sudah ditindaklanjuti sebesar Rp13.200.000. Maka Sisa saldo sebesar Rp62.853.153.
 - 2) Penerimaan Negara kurang dipungut dan/atau disetor ke Kas Negara senilai Rp32.556.000 Pada Panwaslu Kabupaten Klaten. Dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.778.000. Maka Sisa saldo sebesar Rp9.778.000.
 - 3) Pengelolaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Panwaslu Kabupaten Brebes sebesar Rp34.000.000. Sampai dengan Januari 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tindaklanjut atas temuan tersebut dengan bersurat kepada instansi induk terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada waktu itu yaitu Sdr. Drs. Ari Arjunanto. Diperoleh hasil surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes Nomor 800/0029/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Jawaban Permohonan Informasi Pegawai Negeri Sipil A.N Ari Arjunanto. Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Sdr. Ari Arjunanto telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mangkir kerja selama 86 Hari.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018
 - 1) Terdapat Temuan Pemberian Honorarium Kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp8.840.000. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti

dengan dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp8.840.000 dengan nomor Ref: SWD/2019-03- 11/033765 tanggal 11/03/2019.

- 2) Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Bawaslu Kabupaten Pekalongan Belum Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6.393.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp6.393.000. Sehingga sudah tuntas.
 - 3) Pokja-pokja yang personil timnya hanya berisikan pihak internal Bawaslu, yaitu Bawaslu Kabupaten Pekalongan Rp17.055.000 dan sudah ditindaklanjuti sebesar Rp11.535.000 maka sisa saldo Rp4.520.000. Tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pekalongan melampirkan bukti pertanggungjawaban honorarium Pokja yang belum lengkap. Selanjutnya. Menunggu Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tim BPK Semester II Tahun 2021.
- c. Laporan Hasil Reviu BPKP Tahun 2019
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu Semester I Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki saldo temuan sebesar Rp21.771.750 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa tengah. bahwa untuk Laporan hasil reviu BPKP Tahun 2019 sudah Tuntas.
- d. Laporan Hasil Reviu BPK 2021
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 terdapat Catatan atas kelebihan pembayaran Swab Antigen pada Peserta SKPP senilai Rp900.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian sejumlah Rp900.000 dengan nomor NTPN 338143CIF1DDDPH.
- e. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban Inspektorat 2021
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kota Semarang Sejumlah Rp40.448.998. atas catatan tersebut Bawaslu Provinsi telah melakukan pengembalian
- a. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban Inspektorat 2022
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp11.469.692 atas catatan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengembalian.
- b. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban BPK 2022
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp165.871.34200 atas catatan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengembalian ke kas negara.
- c. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban BPK Tahun 2023
- Dalam laporan ikhtisar Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp510.448.651 yang telah disetorkan ke kas

negara sesuai dengan nomor penerimaan 11E291JNFUSQD647 tanggal 19 Maret 2024.

- d. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban Inspektorat/APIP 2023
Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp111.285.477 atas catatan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengembalian.
- e. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban BPK TAYL
Rincian Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp5.754.251 disajikan sebagai berikut:

Tabel 56. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Dokumen	Nominal
1	Pengembalian Belanja Uang makan Tahun Anggaran 2024	22-Apr-25	B9BF961QVD5R7H0 9	3.312.000
2	Pengembalian Belanja Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2024	22-Apr-25	918651JNG89T6GFU	2.442.251
Jumlah				5.754.751

Selanjutnya, rincian realisasi pendapatan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp101.850.842 disajikan sebagai berikut:

Tabel 57. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Purbalingga	21/05/2025	'5D3843CIFTHKIF49	7.515.000
2	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Brebes	21/05/2025	'981F848VVO40VSJ9	7.162.500
3	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	21/05/2025	E35681JNG8CROVAH	8.120.000
4	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kota Surakarta	21/05/2025	'7DB2C6U8F7R69BF6	17.535.000
5	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Demak	21/05/2025	A6E1661QVD8PP2R7	7.905.000
6	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kudus	21/05/2025	'3D06C6U8F7R664G6	7.407.600
7	Pengembalian Belanja Honorarium Pokja Gakkumdu Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Purworejo	21/06/2025	5E7C11JNG8CROFHM	7.440.000
8	Pengembalian Dobel Bayar Tagihan Telekomunikasi Bulan Oktober 2024	18/02/2025	B54CD0NA0DH8NK1I	4.734.527
9	Pengembalian belanja listrik , transport , honor pokja gakkumdu kota semarang	04/02/2025	AA89E0NA0DH1098K	2.935.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
10	Pengembalian sisa transport piket gakkumdu honor pokja administrasi dan transport bawaslu kota semarang	04/02/2025	'808A31JNG83DD8BS	4.039.500
11	Pengembalian Dobel Bayar Tagihan Listrik Bulan Oktober 2024	21/01/2025	867157QLV21FRAAJ	19.562.361
12	Pengembalian belanja perjalanan dinas bawaslu kab cilacap	15/01/2025	BF77F48VVNNU73L8	34.400
13	Pengembalian belanja paket meeting ladinda bawaslu cilacap	14/01/2025	'653A53CIFT5GM6GQ	3.473.862
14	Pengembalian Belanja Honor Narasumber Kecamatan adipala Bawaslu Kab cilacap	14/01/2025	'9CBDB2G502J495V5	900.000
15	Pengembalian Belanja Inkin Bawaslu Kab.Cilacap TA 2024	14/01/2025	'0540355DFIA9G5D8	2.481.022
16	Pengemb. Belanja Bawaslu Kab. Kendal TA 2024	28/03/2025	764A00NA0DKMHOMM	605.070
Jumlah				101.850.842

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp49.214.595 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Kamar Mandi Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	23/04/2025	BA4156U8F7O6G814	1.840.440
2	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Interior Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	23/04/2025	A60506U8F7O6G5S9	24.506.561
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Halaman Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	25/04/2025	8498848VVO12D9RM	9.248.815
4	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang	24/04/2025	11B701JNG89S2V1V	11.989.619
5	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 atas Belanja Modal Renovasi Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Demak	27/03/2025	5EB027QLV27OM46N	1.629.457
Jumlah				49.214.595

Selanjutnya, Rincian Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp23.472.671 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Honor Pokja Isu Negatif Hibah TA 2024	14/04/2025	C39A43CIFTEE7JLD	7.480.000
2	Pengemb. selisih Kas Kelebihan input honor Staf Kecamatan Bawaslu Kab. Kendal	22/04/2025	75F402G502S45811	1.500.000
3	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas (Hibah) Bawaslu Provinsi Jateng TA 2024	25/04/2025	085DE7QLV2ANCBAS	14.094.271
4	Pengembalian Belanja Pengadaan Daya Tahan Tubuh Bawaslu Kabupaten Pemalang TA 2024	25/04/2025	4591455DFIJI716I	398.400

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
Jumlah				23.472.671